



MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

SIAP TANGGAP HADAPI BENCANA

Potensi bencana di Indonesia cukup tinggi. Penanggulan bencana perlu diimbangi dengan mitigasi guna menekan jumlah korban dan kerugian ekonomi. Sejumlah strategi dirumuskan, agar Indonesia lebih tangguh hadapi bencana.



Daftar Isi



Pada edisi Februari ini, kami berusaha mengedukasi bahwa kerugian ekonomi, fisik, dan korban jiwa dari suatu bencana di masa lalu tercatat sangat tinggi. Ke depan, kerugian akibat bencana akan semakin membesar apabila tidak dilakukan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengalihan risiko. Mitigasi itu kami gambarkan dengan objek sebuah *lifebuoy* yang terpasang di sebuah dermaga. *Lifebuoy* tersebut menunjukkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiانا. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyو, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S., Riva Setiara, Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Budi Prayitno, Muchamad Ardani. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Rostamaji, Adelia Pratiwi, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Maria Cecilia Kinanti, Ferdian Jati Permana, Hadi Surono, Sugeng Wistriono, Muchamad Ardani, Adhi Kurniawan, Andi Abdurrochim, Shinta Septiana, Muhammad Fabhi Riendi, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin,. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Rhoric Andra F., Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Nur Iman **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda Victorianus M.I. Bimo,. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

14 TOPIK PILIHAN

15 TAGAR

LAPORAN UTAMA

17 Demi Indonesia Tangguh Bencana

20 Infografis

22 Merancang Anggaran Siaga Bencana

25 Peta Zonasi Jadi Dasar Konsepsi

27 Pembiayaan Bencana di Indonesia

TRIVIA

29 Tahukah Kamu?

WAWANCARA

30 Deteksi Dini Gangguan Mata Cegah Kebutaan

FIGUR

34 Membangun Relasi dengan Komunikasi

OPINI

30 Penanganan Krisis Sistem Keuangan

OPINI

32 Generasi Milenial di Bangku Birokrasi

POTRET KANTOR

42 Menyambung Rasa Perkuat Kinerja

PROFESI

44 Riang Berang Pejabat Lelang

REGULASI

46 Pajak E-commerce Lindungi Pengusaha

GENERASI EMAS

48 Berkreasi Lewat Teknologi

BUGAR

51 Musim Hujan Tiba, Waspada ISPA Melanda

RENUNGAN

52 Bertahan di Bawah Tantangan

BUKU

53 Martabat Manusia dan Ekonomi di Era Teknologi

LOKAL

54 Menikmati Harmoni Irama Gendang Beleq

FINANSIAL

56 Pensiun Bukanlah Garis Finish

134 | **CALL CENTER
KEMENTERIAN KEUANGAN**

WAKTU LAYANAN:
SENIN S.D. JUMAT (HARI KERJA)
08.00 S.D. 16.00 WIB



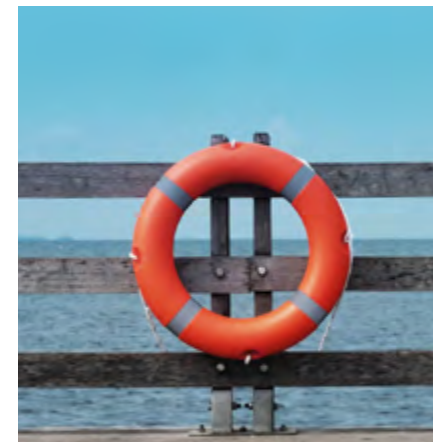
Menguatkan Mitigasi Bencana di Indonesia

Dalam kurun waktu satu tahun, Indonesia mengalami ribuan kali bencana gempa bumi, baik skala besar maupun kecil. Indonesia berada dalam kawasan *ring of fire*, termasuk wilayah yang rawan bencana. Selain itu, ada bencana alam lain seperti banjir, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan, dan letusan gunung berapi. Terhadap bencana tersebut, dibutuhkan banyak biaya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dengan kesadaran akan adanya bencana, maka diperlukan alokasi anggaran untuk mitigasi dan edukasi terhadap adanya bencana alam. Berdasarkan perkiraan, sejak 2004, kerugian atas bencana alam setiap tahunnya rata-rata mencapai angka sekitar Rp20 triliun. Tentu saja dibutuhkan lebih banyak lagi biaya untuk memperbaikinya.

Dengan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah mengalokasikan dana untuk dapat melakukan penanggulangan bencana. Selain itu, disediakan pula dana *on call* yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk kebutuhan mendesak serta dana tambahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan penghitungan kerugian.

Beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) juga mengalokasikan dana untuk penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Misalnya, Kementerian Kesehatan untuk



oleh Menko Maritim ini bertujuan untuk menyatupadukan semua kegiatan, mulai dari edukasi, mitigasi, sampai penanganan pascabencana untuk rekonstruksi dan rehabilitasi. Selain untuk membuat lebih fokus dalam penanganan bencana, Perpres ini juga dapat menimbulkan efisiensi dalam alokasi anggaran untuk bencana.

Sementara itu, dalam APBN 2019 telah dilakukan *piloting* asuransi bagi beberapa gedung dan Barang Milik Negara yang dianggap penting di daerah rawan bencana. Dalam APBN 2019 juga telah dikembangkan kerangka pendanaan risiko bencana, skema transfer risiko, dan skema APBN. Skema asuransi yang telah ada yaitu berupa asuransi pertanian dan nelayan yang juga dilanjutkan pada APBN 2019.

Pemerintah senantiasa menggunakan APBN sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bernegara dan juga melindungi rakyat, termasuk bila terjadi bencana alam. Berbagai bencana yang terjadi, baik bencana alam nasional maupun dunia, menjadi bahan pembelajaran untuk mempertajam APBN. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat lebih optimal dalam membantu masyarakat yang terkena bencana. Bencana tidak dapat ditolak, namun risikonya dapat ditekan seminimal mungkin.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi



Foto
Anas Nur
Huda

AWASI CUKAI DEMI NEGERI

Salah satu petugas Bea dan Cukai melaksanakan pengawasan pada salah satu industri yang berlaku BKC (Barang Kena Cukai). BKC terdiri dari etanol, minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), dan hasil tembakau. Pengawasan ini dilakukan untuk menjalankan tugas utama yaitu memungut dan mengumpulkan penerimaan negara.



Bukittinggi

Keripik Sanjai di Kampung Sanjai

Sanjai adalah nama sebuah kampung di daerah Bukittinggi tempat asal mula keripik sanjai. Makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar singkong ini merupakan salah satu produk unggulan UMKM Bukittinggi. Di kampung Sanjai, pembuatan keripik masih manual. Tempat pembuatan kripik ini sekaligus menjadi tempat wisata untuk melihat secara langsung proses pembuatan, pengolahan, dan belajar membuat keripik sanjai.

Foto
Resha A.
Pratama





21/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Bekerja dengan Hati untuk Menjaga Janji Republik

Dalam rangka penguatan komunikasi dan membangun persepsi bersama di tahun politik, Kemenkeu menyelenggarakan acara *Executive Gathering* Tahun 2019 dengan tema “Menjaga Janji Republik” di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kemenkeu pada Senin (21/01). “Saya berharap acara internal dari, oleh, dan untuk kita, dapat memperkaya perspektif dan cara bersikap dalam menjalankan tugas yang sangat penting yaitu menjaga keuangan negara dalam menjaga janji republik,” buka Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Yang menjadi pembicara dalam acara tersebut selain Menkeu adalah Yudi Latif (Direktur Eksekutif Reform Institute), Askolani (Dirjen Anggaran), Luky Alfirman (Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko), Astera Primanto Bhakti (Dirjen Perimbangan Keuangan) dan dimoderatori oleh Hadiyanto (Sekretaris Jenderal).

Menkeu berpesan kepada eselon I dan II Kemenkeu untuk bekerja dengan hati dalam menjalankan tugas dalam rangka memenuhi Janji Republik dan juga bekerja dengan semangat karena akan menentukan hasil. Bekerja dengan hati, pikiran dan sikap yang penuh akan memberikan hasil yang berbeda dengan yang bekerja karena sekedar bekerja. “Yang duduk

disini adalah Eselon 2 yang merupakan top rank. Eselon 1 dan 2 yang membedakan adalah garis tangan. Tidak mungkin semua menjadi eselon 1 meskipun secara kemampuan sama. Keputusan Anda mempengaruhi Indonesia. Saya ingin semua pejabat di Kemenkeu, Anda bekerja dengan pikiran, hati, dan passion anda karena dapat menentukan hasil yang baik,” pesan Menkeu.

Fungsi sebagai Bendahara Umum Negara tidak ada artinya tanpa kepercayaan dan kredibilitas. Menkeu ingin jajaran Kemenkeu memperbaiki komitmen dan tata kelola serta kinerja. “Kita perlu perbaharui apa artinya menjadi Indonesia, apa artinya menjalankan fungsi menjadi estafet dalam mengelola keuangan negara. Indonesia telah berusia 73 tahun. Sering dalam hidup selain bekerja, beribadah, kita juga melihat perspektif lain agar memahami sedikit tentang Indonesia. Tahun 2018 telah kita tutup dengan baik. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah bekerja dengan baik. Saya ingin di 2019, semangat yang sama dijaga dengan tantangan yang tidak makin mudah dan dengan dinamika yang ada kita akan optimis menghadapinya,” ujar Menkeu.

26/12

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Peninjauan Kesiapan DJPB di Akhir Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan peninjauan lapangan secara rutin dilakukan tiap akhir tahun ke kantor vertikal dan kantor layanan Ditjen Perbendaharaan dalam menghadapi tutup tahun anggaran 2018. Menkeu melakukan kunjungan kerja ke KPPN Jakarta III dan VII yang berlokasi di Komplek Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (26/12). “Di sini kita melihat kegiatan hari terakhir bagi seluruh satker yang ada di wilayah DKI Jakarta yang merupakan sekitar 75 persen dari keseluruhan belanja negara itu adalah sepenuhnya diwakili oleh satker yang ada di DKI Jakarta. Di dalam rangka mereka menyelesaikan untuk penyerahan dokumen dalam rangka pencairan dana APBN hari terakhir,” jelas Menkeu.



04/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Penyampaian Hak-hak Pegawai Kemenkeu Korban Musibah Lion Air JT610

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan apresiasi Kementerian Keuangan dan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para keluarga pegawai Kemenkeu korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Menkeu menguatkan agar meninggalnya para pegawai tersebut tidak membuat para keluarga korban berputus asa terutama bagi para putra-putrinya untuk meneruskan cita-citanya. Hal ini disampaikan Menkeu pada acara “Silaturahmi & Penyampaian Hak-Hak Pegawai Kementerian Keuangan Yang Mengalami Musibah Kecelakaan Pesawat Udara Lion Air JT610” di Aula Mezanine, Jum’at (04/01). “Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban karena seluruh dedikasi yang telah diberikan oleh anggota keluarga di dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan negara dan tewasnya anggota keluarga di dalam menjalankan tugas adalah suatu kesedihan dan kehilangan yang sangat besar bagi kita semua,” tutur Menkeu.

02/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kondisi perekonomian Indonesia yang sangat positif di tengah ketidakpastian perekonomian global akibat perang dagang AS dan Tiongkok dalam Konferensi Pers bertajuk Kinerja dan Realisasi APBN 2018 di Aula Djuanda, Rabu (02/01). “Untuk pertama kalinya APBN 2018, pendapatan negara mencapai 102,5 persen. Target awal Rp1.894,7 triliun dan tercapai Rp1.942,3 triliun,” ungkapinya. Tak hanya pendapatan, belanja negara pun menunjukkan peningkatan yang baik. Tahun ini belanja negara mampu mencapai 99,2 persen, di mana tahun lalu hanya mencapai 94,1 persen. Salah satu faktornya adalah karena tidak adanya APBN Perubahan (APBN-P), maka Kementerian/Lembaga dapat fokus pada anggaran belanja yang sudah direncanakan.



10/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Peresmian Jembatan Leta Oar Ralan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang merupakan jembatan penghubung antara dua pulau yaitu Pulau Yamdena dan Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Barat, Provinsi Maluku pada Kamis, (10/01). Jembatan Leta Oar Ralan dibiayai melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan skema *Multi Years Contract Tahun Anggaran 2016-2018*, mempunyai panjang 323 meter yang menelan anggaran lebih dari Rp123 miliar. "Ini merupakan salah satu bentuk komitmen dimana kami mendesain instrumen APBN sesuai dengan kebutuhan dan infrastruktur salah satu yang memang membutuhkan berbagai inovasi pendanaan yang bisa kita terus lakukan," jelas Menkeu. Menkeu juga mengatakan dirinya sangat bahagia sudah meresmikan jembatan Leta Oar Ralan karena merupakan bukti nyata kemajuan hasil pembangunan infrastruktur sebagai sarana menghubungkan masyarakat agar mereka mendapatkan fasilitas maupun kesejahteraan dan pelayanan dasar terbaik dari pemerintah.

15/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Sharing Session Economic Outlook 2019

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menghadiri acara *Sharing Session Economic Outlook 2019* di Hotel Adi Mulia, Medan, Selasa (15/01). *Sharing Session* ini bertujuan untuk menyimak paparan dari para pakar ekonomi tentang apa yang akan terjadi di tahun 2019 serta sarana berdiskusi bagi para pemangku kepentingan sehingga para pihak mengerti bagaimana arah pergerakan perekonomian pada tahun ini. "BPD memiliki peran sebagai *strategic partner* pemerintah sekaligus motor percepatan pembangunan daerah," jelasnya. Wamenkeu menekankan peran penting Dewan Komisaris bersama Direksi dalam mewujudkan 'BPD Bersih' dan berdaya saing tinggi. Adanya keteladanan, transaksi yang memperhatikan aspek tata kelola yang baik, pengelolaan SDM, kebijakan standar pelayanan minimum dan kebijakan remunerasi berbasis kinerja diharapkan menjadi hal-hal pokok yang diperhatikan oleh BPD.

15/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Hasil Sinergi Penertiban Impor di Selat Malaka, Pesisir Timur, dan Batam

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, bersama Menko Maritim, Menteri Perhubungan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua KPK mengadakan konferensi pers Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera serta Ekspos Hasil Penindakan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Menkeu mengungkapkan kerjasama kolaborasi seluruh institusi ini dinilai berhasil dalam melakukan pengamanan penerimaan negara. "Dengan adanya sinergi ini, mampu meningkatkan kepatuhan para importir. *Tax based* meningkat sebesar 62%, penurunan entitas importir berisiko tinggi sebesar 46%, dan peningkatan jumlah akumulasi Bea Masuk dan Pajak," jelas Menkeu di atas kapal sitaan hasil tangkapan penyelundupan 1500 KL Crude Oil, Selasa (15/01).



18/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Signal Test Proyek Palapa Ring Tengah

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara melakukan kunjungan kerja di Kota Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Jumat (18/01). Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melakukan uji coba jaringan Palapa Ring Paket Tengah. Menkominfo dan Menkeu memantau dan mencoba akses internet yang sudah terhubung dengan jaringan serat optik Palapa Ring Tengah. "Saya bahagia dalam kurun kurang satu bulan, datang ke timur Indonesia untuk menjalankan program membangun Indonesia dari pinggiran dan menyatukan Republik Indonesia. Hari ini kita melihat salah satu hasil pembangunan yaitu palapa ring bagian tengah," ucap Menkeu. Selain itu, Menkeu mengunjungi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tahuna dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tahuna.

15/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

PPP Day 2019 untuk Menjaring Investor

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Indonesia *Public Private Partnership* (PPP) Day 2019 di Singapura pada Selasa, (15/01) dengan tema "*Beyond Boundaries: Indonesia As a Global PPP Investment Destination*" untuk menjaring lebih banyak investor. Dalam kesempatan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai APBN yang sehat dan kuat. Selain itu, Menkeu menyampaikan juga bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk keberlanjutan *Public Private Partnership* (PPP)/Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). "Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan populasi terbesar keempat di dunia, dan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2030. Oleh karena itu, kita membutuhkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan," ujar Menkeu.



Pajak e-Commerce untuk Siapa?

Akhir tahun lalu, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Beleid yang ditandatangani tanggal 31 Desember tersebut menjadi topik yang banyak dibicarakan oleh media mengikuti agenda dari Direktorat Jenderal Pajak terkait kepatuhan perpajakan selebgram. Direktur CITA, Yustinus Prastowo, mengungkapkan bahwa pemerintah perlu segera mengatur pajak untuk youtuber dan selebgram.

Lead Revenue Adviser program kerjasama pembangunan ekonomi Australia-Indonesia, Rubino Sugana, juga memberikan sudut pandang tersendiri. PMK e-Commerce seharusnya tidak dipandang sebagai tambahan beban bagi pelaku usaha, melainkan memberi kepastian dan kemudahan baik bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maupun bagi otoritas pajak untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak.

Rubi juga berpendapat bahwa pengumpulan identitas pengusaha (NIK) oleh penyelenggara platform e-commerce merupakan suatu keharusan, tidak hanya dilihat dari sisi perpajakan, tetapi juga dari keamanan bertransaksi baik dari sisi penjual maupun konsumen. Berusaha di platform e-commerce ibaratnya berdagang di mal dimana kenyamanan dan rasa aman yang disediakan oleh penyedia mal dapat dirasakan oleh konsumen. Sedangkan berusaha di sosial media ibaratnya berdagang di 'kaki lima' dimana pedagang harus berupaya ekstra keras untuk meyakinkan konsumen berbelanja di lapak mereka.

Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjawab kekhawatiran pelaku e-commerce. Menkeu menegaskan bahwa beleid baru tersebut tidak mengatur jenis atau tarif pajak baru, namun hanya tata cara dan prosedur pemajakannya. Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah tidak hanya sekedar memungut pajak, namun juga memberika fasilitas dan insentif kepada dunia usaha. Terakhir, Menkeu mengatakan akan berkoordinasi dengan BI, BPS dan Kominfo terkait penyampaian informasi agar tidak menambah beban penyedia marketplace.

Menurut Josua Pardede, Ekonom Bank Permata, PMK yang akan mulai berlaku efektif pada 1 April 2019 ditujukan untuk memberikan kepastian perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan transaksi e-commerce. Ia berpendapat bahwa

PMK itu tidak akan memberatkan UMKM e-commerce mengingat PPh yang harus dilaporkan sebesar 0,5 persen. Selain itu, UMKM tidak menjadi subjek pajak pertambahan nilai (PPN), karena UMKM belum tergolong pengusaha kena pajak, sehingga tidak ada beban tambahan yang harus ditanggung oleh pengusaha UMKM yang dapat menghambat pertumbuhannya.

Ulasan lebih dalam terkait beleid baru PMK Nomor 210 Tahun 2018 ini dapat dibaca pada rubrik Regulasi **halaman 46**.

Topik Lain

Sorotan lain terkait Kemenkeu sebulan terakhir didominasi pula oleh divestasi saham PT Freeport pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kepemilikan Indonesia atas 51,2 persen saham Freeport. Rupiah yang semakin perkasa terhadap Dolar AS di awal tahun juga sempat menjadi sorotan utama masyarakat. Berbagai padangan masyarakat muncul diwarnai dengan beragam tanggapan dari Pemerintah, Bank Indonesia, ekonom, pengusaha serta politisi.

Di sisi lain, awal tahun ini topik realisasi penerimaan negara dalam APBN 2018 juga tercatat melebihi target, meskipun penerimaan pajak masih *shortfall*. Sementara itu, defisit keseimbangan primer terindikasi mengalami perbaikan dan mengarah ke angka nol atau surplus. Realisasi pertumbuhan ekonomi sendiri juga masih menunjukkan hasil yang baik di tengah tekanan ekonomi global.

Teks Abdul Aziz

Setiap bulan Media Keuangan mengajak partisipasi pembaca untuk memberikan opini lewat kuis di kanal instagram @majalahmediakeuangan dan twitter @kemenkeuri. Opini yang diberikan menanggapi topik-topik hangat pilihan redaksi. majalahmediakeuangan dan twitter @kemenkeuri. Opini yang diberikan menanggapi topik-topik hangat pilihan redaksi.

-  www.kemenkeu.go.id
-  [KemenkeuRI](#)
-  [@KemenkeuRI](#)
-  [KemenkeuRI](#)
-  [KemenkeuRI](#)
-  [majalahmediakeuangan](#)



Like

Reply



@pennyfebriana Selain memberikan payung hukum yang lebih jelas, peraturan ini juga memberikan "insentif yang berkeadilan" bagi pelaku usaha e-commerce, karena besarnya potensi peningkatan pajak dari e-commerce akan sangat membantu program pemerintah.



@edomaribun Dengan adanya PMK 210/2018 kiranya dapat menghasilkan data yang akurat untuk nantinya menata ekosistem e-commerce yang lebih baik dan adil demi kemajuan bangsa.



@fith101 Sosialisasi terhadap aturan ini harus gencar dilakukan, terutama bagi mereka yang terlibat di kegiatan e-commerce; agar tidak terkesan Pemerintah agresif banget mencari duit buat negara.



@KemenkeuRI Sampaikan optimisme #temankeu mengenai upaya Pemerintah yg trs mengembangkan kebijakan mengenai pengelolaan dana bencana alam yg lebih baik.



@ArielGun7 harus ada pengawasan terhadap aliran dana tersebut agar bisa teralokasikan secara tepat dan efektif



@rizkimashri Anggaran jenis ini pada #APBN2019 lebih besar daripada tahun kemarin, artinya pemerintah belajar dan terus menyiapkan diri lebih baik.



@ynf77 Pemerintah sebagai pihak pemegang kendali pemerintahan harus lebih Tanggap dalam mengelola dana bantuan bencana jangan sampai ada distorsi dan manipulasi dana bantuan pada setiap daerah.



DEMI INDONESIA TANGGUH BENCANA

Pada penghujung 2018, Ibu Pertiwi kembali dirundung duka. Belum usai tangis bagi korban gempa bumi di Lombok, serta tsunami di Palu dan Donggala, kini giliran Selat Sunda dihantam bencana. Pada pukul 21.27, gelombang tsunami setinggi 2 hingga 5 meter menerjang pantai di sekitar Pandeglang, Serang, dan Lampung Selatan. Korban akibat bencana mencapai 437 orang meninggal, 16 orang hilang, dan 14 ribu orang luka-luka. Dari sisi kerusakan, 2.752 unit rumah luluh lantak, sedangkan 33.719 penduduk diungsikan.

Tinggi kerugian

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, total kerugian yang dialami negara akibat bencana bisa mencapai Rp22 triliun setiap tahunnya. “Hal ini belum termasuk kerugian jiwa,” ungkap Menkeu.

BNPB merinci lebih jauh kerugian ekonomi yang ditimbulkan beberapa bencana besar. Sebut saja, gempa bumi yang terjadi di Lombok dan Sumbawa. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan mencapai angka Rp17,3 triliun. Sementara kerugian akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah mencapai lebih dari Rp13,82 triliun dan diperkirakan terus bertambah.

Tidak dapat dipungkiri, Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Dari sisi geologi, Indonesia berada di antara pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng pasifik. Aktivitas tektonik yang terjadi selanjutnya menimbulkan deretan gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, utara Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Deretan gunung api ini merupakan bagian dari deret gunung api sepanjang Asia Pasifik yang dikenal

Seorang ibu ditengah puing bangunan rumahnya yang hancur akibat bencana.

Foto
Irfan Bayu

dengan *Ring of Fire*. Gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api adalah sejumlah bahaya yang mengancam Indonesia akibat kondisi geologi ini.

Anggaran bencana

Dalam menangani bencana, pemerintah mengalokasikan anggaran bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah kegiatan pada tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Dari tiga tahapan tersebut, kegiatan pascabencana membutuhkan pembiayaan yang paling besar.

Ditemui Media Keuangan beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Anggaran, Askolani menuturkan, selama beberapa tahun terakhir pemerintah mengalokasikan dana cadangan bencana setiap tahunnya. Besar anggaran yang dialokasikan sekitar Rp4 triliun yang berasal dari APBN.

“Dana tersebut dipakai untuk dua tujuan. Satu, untuk tanggap darurat. (Digunakan) untuk mengatasi bencana dalam jangka pendek. Misalnya untuk (penyediaan) tenda, menyiapkan makan, pengungsian, dan lain-lain,” ungkapnya. Kedua, selain dana tanggap darurat, dana cadangan bencana juga digunakan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. “Sebab setelah bencana, pemda-pemda itu banyak butuh untuk membangun fasilitas publiknya,” ungkapnya.

Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Irfa Ampri mengungkapkan, pada praktiknya, dana cadangan bencana tidak selalu habis terpakai. Hal ini dikarenakan intensitas bencana setiap tahunnya tidak selalu sama. “Kalau tidak ada bencana besar, dana (cadangan bencana) itu tidak terpakai semuanya,” jelasnya.

Dijelaskan Askolani lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi

lembaga yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penanganan bencana. “Dia (BNPB) melakukan koordinasi lintas kementerian termasuk pemda, untuk bisa melakukan mitigasi dan penanganan bencana,” ungkapnya.

Saat bencana terjadi, apabila dana siap pakai (*on call*) yang ada di BNPB tidak mencukupi, BNPB dapat mengajukan permohonan penambahan dana *on call* untuk kegiatan tanggap darurat ke Kementerian Keuangan. Selanjutnya, penggunaan dana cadangan tersebut dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) atau dihibahkan ke daerah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui koordinasi BNPB. “Selama bertahun-tahun, dana tersebut bisa cepat digunakan dan BNPB tidak pernah mengalami kesulitan,” ungkap Askolani.

Pemulihan kondisi

Tingginya intensitas bencana pada 2018 berdampak pada kebutuhan anggaran yang melebihi dana cadangan yang telah disediakan pemerintah. Irfa Ampri menuturkan, untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah melalui sejumlah K/L yang terkait infrastruktur, melakukan realokasi anggaran agar kegiatan penanggulangan bencana tetap bisa dijalankan.

“Mereka (K/L) sudah punya anggaran untuk proyek-proyek konstruksi, tapi karena ada bencana ini, terpaksa mereka merealokasi (anggaran), mengalihkan (dari) yang sebelumnya, misalkan, untuk daerah lain, tapi karena kebutuhan dana yang besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, K/L terpaksa melakukan realokasi,” ungkapnya.

Meski demikian, Askolani mengaku, selama 2018, pemerintah tetap mengeluarkan dana yang diperlukan untuk memulihkan kondisi pascabencana. Pada bencana Lombok misalnya, pemerintah membantu pembiayaan untuk pembangunan kembali 189 ribu rumah penduduk.

“Terbagi atas tiga bentuk bantuan.

Kalau rusak berat itu dibantu Rp50 juta, rusak sedang dibantu Rp25 juta, dan rusak ringan dibantu Rp10 juta,” ungkap Askolani. Total bantuan yang dikeluarkan pemerintah untuk kegiatan rekonstruksi ini mencapai Rp3,4 triliun.

Selain Lombok, pemerintah juga tengah melakukan *briefing* untuk pembangunan rumah di Palu, Sulawesi Tengah. Termasuk juga, rekonstruksi atas bencana tsunami yang terjadi di Banten dan Lampung. Selanjutnya ke depan, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan hingga 2020. Menurut Askolani, sumber pendanaan diperoleh dari dana cadangan bencana berupa rupiah murni, serta bantuan dari beberapa lembaga donor dunia.

“Paling tidak pada APBN 2019, dana untuk bencana yang bisa dipakai total Rp15 triliun,” ungkap Askolani. Dana tersebut dibagi untuk kebutuhan antisipasi bencana *on call* sebesar Rp5 triliun, serta Rp10 triliun dana rehabilitasi untuk Lombok, Palu, serta Banten dan Lampung.

Strategi pembiayaan

Menghadapi tantangan akan kebutuhan pendanaan dalam jumlah besar, serta mengurangi kerugian ekonomi dan beban APBN akibat bencana, pemerintah tengah mengkaji sejumlah pilihan pembiayaan risiko bencana. Hal baru yang sedang dikaji pemerintah salah satunya adalah skema *pooling fund*. Skema ini memungkinkan pengelolaan dana khusus bencana oleh lembaga pengelola dana untuk selanjutnya disalurkan saat terjadi bencana.

Irfa Ampri menuturkan, sumber *pooling fund* berasal dari APBN. Sebagai modal awal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk persiapan pembentukan *pooling fund*. Ke depan, sumber dana *pooling fund* bisa diperoleh dari alokasi APBN setiap tahun, sisa dana tanggap darurat yang tidak terpakai, hasil investasi atas dana yang dikelola, hasil pembayaran klaim asuransi, serta sumbangan donor.



Dana tanggap darurat digunakan untuk mengatasi bencana alam dalam jangka pendek.

Foto Resha Aditya

Melalui *pooling fund* diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa diakselerasi.

“Jadi yang tadinya harus nunggu sampai empat tahun baru dibangun semuanya, *nah* ini mungkin dalam satu dua tahun sudah bisa dibangun semuanya, pemulihan lebih cepat dan ekonomi bisa kembali aktif,” harap Irfa.

Selain *pooling fund*, pemerintah juga mulai mengembangkan skema transfer risiko melalui asuransi barang milik negara (BMN). Untuk 2019, Kementerian Keuangan menjadi *piloting project*. Objek BMN yang diasuransikan meliputi gedung kantor permanen, gedung pendidikan permanen, dan bangunan klinik.

“Mekanismenya sedang disiapkan oleh Kemenkeu pada 2019. Jadi premi disiapkan untuk alokasi belanjanya. Kalau ada klaim akan masuk sebagai PNPB dan digunakan untuk membangun kembali aset-aset (terdampak bencana),” jelas Askolani. Menurutnya, apabila sukses, maka dalam jangka menengah asuransi BMN akan dikembangkan dengan lingkup yang lebih luas.

Memitigasi risiko bencana

Dosen sekaligus peneliti kebencanaan Universitas Padjadjaran, Bevaola Kusumasari menyampaikan, di banyak negara, bencana belum menjadi prioritas dalam pengelolaan kegiatan pemerintah. Secara umum, beberapa negara maju yang memiliki pengalaman dan kesadaran atas risiko bencana mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk kegiatan mitigasi dan reparasi, disamping kegiatan respons dan *recovery* bencana.

“Bagi negara maju, meminimalisasi jumlah korban menjadi hal penting, dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini berbeda dengan negara berkembang yang lemah terhadap mitigasi dan preparasi,” ungkap Bevaola.

Menyadari hal ini, pemerintah tengah berkoordinasi menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran untuk mitigasi bencana. “Ini di-*lead* oleh Menko Maritim. Kita sudah beberapa kali rapat disana untuk bisa menyusun perencanaan penganggaran untuk mitigasi,” kata Askolani.

Pertemuan dilakukan dengan melibatkan banyak K/L

terkait. Beberapa yang menjadi pembahasan diantaranya terkait desain rencana mitigasi jangka menengah, perangkat mitigasi, seperti alat deteksi bencana, serta penganggaran. “Penganggaran untuk mitigasi diperkirakan sekitar Rp1,7 triliun yang akan dilakukan lintas kementerian,” ungkap Askolani.

Selain itu, dalam pembahasan tersebut, pemerintah juga mempersiapkan regulasi mitigasi bencana. “Minimal regulasi ini akan memperkuat dan mempertegas siapa melakukan apa, baik itu sebelum bencana maupun setelah bencana,” jelas Askolani.

Diharapkan dari regulasi tersebut nantinya akan ada sinergi lintas K/L maupun pemda dalam membuat sistem guna mendeteksi bencana. Selain itu dibahas pula pihak yang berkewajiban mengedukasi masyarakat baik dari sisi *hard skill* maupun *soft skill* dalam menghadapi bencana, termasuk kewenangan terkait titik penanganan bencana baik di wilayah barat, tengah, dan timur.

Teks Farida Rosadi

BENCANA DAN ANGGARAN PENANGGULANGAN

Bencana di Palu, Donggala, dan NTB yang terjadi pada 2018 menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri mengatasi bencana serupa yang terjadi sewaktu-waktu. Indonesia termasuk 35 negara yang berisiko mengalami bencana paling tinggi di dunia. Dalam APBN bentuk alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk mendanai kegiatan yang bersifat tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, maupun rencana penerapan transfer risiko melalui program asuransi

- Bencana Geologi**
 - Gempa Bumi
 - Letusan Gunung Berapi
 - Tsunami
- Bencana Hidrometeorologi**
 - Banjir
 - Tanah Longsor
 - Kebakaran Hutan
 - Kekeringan
- Bencana Biologi Akibat Penggunaan Senjata dan Bahan Kimia Berbahaya**
- Bencana Teknologi dan Penurunan Kualitas Lingkungan Akibat Eksploitasi**
- Bencana Kerentanan Sosial**
- Infrastruktur /Elemen Yang Mengakibatkan Risiko Bencana**

SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA

- APBN/APBD
- Dana Kontijensi
- Dana On-Call
- Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah
- Dana Yang Bersumber Dari Masyarakat
- Dana Dukungan Komunitas Internasional

GAP PEMBIAYAAN

Rata-rata Dana Cadangan (2005-2017) sebesar:
RP3.1 TRILIUN

Rata-rata Kerugian Ekonomi Langsung Per Tahun (2000-2017) sebesar:
RP22.8 TRILIUN

Sumber: BKF

Terdapat GAP Pembiayaan sebesar:
RP19.75 TRILIUN/

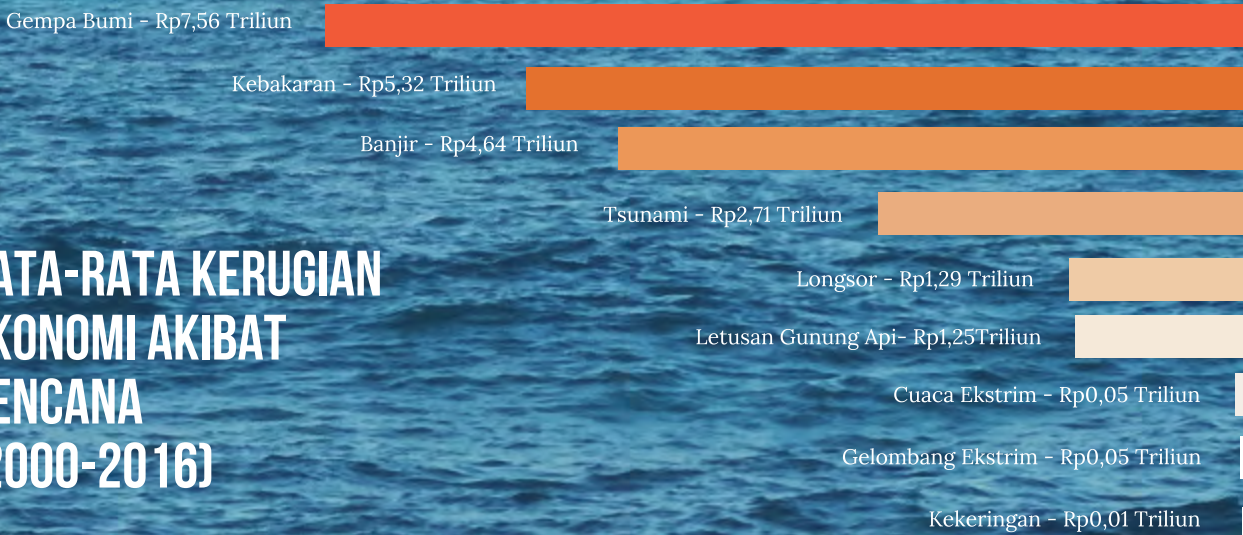
78%

TREN JUMLAH BENCANA

*Jumlah Bencana Per Tahun
Sumber: Laporan Kinerja BNPB



RATA-RATA KERUGIAN EKONOMI AKIBAT BENCANA (2000-2016)



MERANCANG ANGGARAN SIAGA BENCANA



Kapal milik PLN terhempas ke daratan saat bencana tsunami Aceh

Foto Anas Nur Huda

Malam itu cuaca masih terlihat normal. Semua orang beraktivitas seperti biasa di bibir pantai. Namun siapa sangka menjelang tengah malam, tsunami tiba-tiba meluluhlantakan daerah sekitar Pandeglang Banten dan Lampung Selatan. Kejadian tak terduga dan langka karena berasal dari longsoran vulkanik tersebut menjadi pengingat bahwa negara Indonesia memiliki potensi beragam jenis bencana alam yang menyebar di seluruh wilayah. Tak tanggung-tanggung, potensi risiko tersebut memiliki tingkat intensitas dan dampak kerugian yang masif.

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam jenis bencana alam yang menyebar di seluruh wilayahnya, dengan intensitas kejadian yang tinggi dan dampak kerugian yang masif. Indonesia termasuk dalam daftar 35 negara yang mempunyai risiko tinggi jatuhnya korban jiwa akibat berbagai jenis bencana alam. Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan upaya persiapan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

“Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2019 sebesar Rp1.634 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp855,4 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp778,9 triliun. Selain itu, untuk mengantisipasi kebutuhan dana bagi kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam akan dibentuk *pooling fund* bencana yang bersumber dari APBN,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers APBN 2019 beberapa waktu lalu.

Reformasi Kebijakan Pembiayaan Bencana

Nilai kerugian ekonomi akibat bencana besar tercatat sangat tinggi. Menurut data dari Nota Keuangan APBN 2019, gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias pada tahun 2004 mampu menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp41,4 triliun. Namun, Bank Dunia memperkirakan nilai kerugian tersebut hanya merepresentasikan 60 persen dari nilai kerugian secara riil. Kerugian ekonomi yang besar tersebut disebabkan antara lain oleh kualitas infrastruktur yang belum ramah bencana dan kebijakan pembiayaan bencana yang hanya terfokus pada pembiayaan pascabencana. Sementara kebijakan dan instrumen mitigasi dan transfer risiko masih sangat terbatas.

Menurut Kunta W.D. Nugraha, Direktur Penyusunan APBN (PAPBN) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), APBN sendiri memang memiliki keterbatasan dalam pendanaan bencana. Selama 12 tahun terakhir, alokasi APBN untuk Dana Cadangan Bencana sekitar Rp4 triliun per tahunnya. Di sisi lain, di masa tidak terjadi bencana katastrofik, dana cadangan bencana belum termanfaatkan secara optimal. Menghadapi tantangan ini, Pemerintah berencana melakukan reformasi kebijakan pembiayaan risiko bencana dalam rangka meningkatkan ketangguhan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat

dalam menghadapi bencana, serta meningkatkan kemampuan untuk membangun kembali dengan lebih baik.

“Ke depannya kita juga sudah mulai memikirkan bagaimana kita bisa mengatasi bencana tadi dengan lebih terorganisir dan teratur tapi bebannya tidak semuanya melalui APBN,” jelas Kunta.

Reformasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan bencana dalam jumlah besar, tepat waktu dan sasaran, lebih terencana, berkelanjutan dan transparan untuk mengurangi kerugian ekonomi dan beban APBN. Pembiayaan risiko bencana ini harus mampu pula untuk menjawab kebutuhan pembiayaan di masa tidak terjadi bencana dalam rangka mitigasi dan transfer risiko bencana, pembiayaan ketika terjadi bencana (tanggap darurat) dan pembiayaan setelah terjadi bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

“Memang bencana di Indonesia itu banyak sekali, tiap tahun ada terus, sehingga kita juga sudah mulai melihat mengantisipasi ini dengan ada namanya cadangan bencana itu. Kalau ada suatu kejadian itu ada namanya dana *on call* yang lebih kepada untuk kondisi bencana seperti pertolongan darurat, kondisi kebutuhan sanitasi. Itu biasanya 6 bulan. Nanti semuanya lewat BNPB, masuk ke sana. Tapi setelah itu, bisa 6-12 bulan itu namanya rehab-rekon setelah kondisi bencana, seperti membangun lagi jembatan dan sekolah. Itu juga pakai dana cadangan tadi. Namun ada juga K/L yang merealokasi anggarannya. Misalnya PUPR yang akan membangun jalan yang rusak.



“Dengan adanya *pooling fund*, kita berharap, tergantung kepada dana yang dimiliki oleh *pooling fund*, kita berharap bisa mengakselerasi tahap rehabilitasi rekonstruksi. Jadi yang tadinya harus nunggu sampai empat tahun baru dibangun semuanya, nah ini mungkin dalam satu dua tahun sudah bisa dibangun semuanya”

Irfa Ampri Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB)

Ini yang dinamakan *budget based*. Ini adalah mitigasi bencana dari sisi APBN,” ungkap Kunta.

Anggaran Pooling Fund

Bencana alam berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN. Untuk itu, perlu dikembangkan berbagai macam alternatif pembiayaan risiko bencana, baik dari segi sumber maupun pola pengalokasiannya. Dengan mempertimbangkan naiknya probabilitas kejadian bencana, meningkatnya nilai kerusakan dan kerugian akibat

bencana dan perubahan iklim serta laju urbanisasi yang cepat, Pemerintah saat ini masih mengkaji kemungkinan meningkatkan keragaman dalam pilihan-pilihan pembiayaan risiko bencana termasuk melalui asuransi bencana, pinjaman siaga bencana, dan *pooling fund*.

Skema *pooling fund* ini direncanakan akan memperoleh modal dari APBN. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB), Irfa Ampri, mengungkapkan bahwa modal awal telah dianggarkan sebesar Rp1 triliun dalam APBN 2019. “Jadi Rp1 triliun untuk *shift capital*-nya. Jadi nanti sumbernya dari APBN, setiap tahun nanti kita usulkan dana yang selama ini di tanggap darurat bisa sebagian langsung ke *pooling fund* ini. Kemudian yang dana tanggap darurat tadi kalau dia tidak terpakai selama ini kan kembali lagi ke negara, itu nanti akan masuk ke *pooling fund* ini. Jadi rencananya akan dapat rutin dan juga dapat sisa anggaran yang tidak terpakai,” jelasnya.

Beberapa opsi pembiayaan antara lain melalui alokasi anggaran maupun realokasi anggaran di beberapa K/L terkait dan dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan yang dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana *on-call*) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (dana kontingensi). Apabila terjadi bencana, beberapa K/L seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan K/L lainnya akan melakukan realokasi anggarannya dalam rangka pembiayaan bencana. Selain itu, dalam rangka pembiayaan bencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan melalui pengalokasian anggaran pada K/L terkait pada tahun berikutnya dan/atau menggunakan bagian dari dana cadangan penanggulangan bencana.

Terkait hal tersebut, Irfa menjelaskan bahwa dana tersebut akan dikelola dan akumulasi dana dapat digunakan untuk membantu dalam kondisi tanggap bencana. “Dengan adanya *pooling fund*, kita berharap, tergantung kepada dana yang dimiliki oleh *pooling fund*, kita berharap bisa mengakselerasi tahap rehabilitasi rekonstruksi. Jadi yang tadinya harus nunggu sampai empat tahun baru dibangun semuanya, nah ini mungkin dalam satu dua tahun sudah bisa dibangun semuanya gitu. Sehingga pemulihannya menjadi cepat, ekonomi juga kembali aktif lebih cepat. Karena biasanya kalau terjadi bencana ya ekonomi langsung jatuh. Kita

berharap itu tidak berlangsung lama karena kalau tidak pasti nanti angka kemiskinan akan meningkat” jelasnya.

Asuransi BMN

Dalam proses penyusunan strategi dan solusi pembiayaan bencana tersebut, Pemerintah memerhatikan beberapa faktor utama yang menentukan keberhasilan perumusan. Salah satunya adalah melalui pembagian atau pemisahan (*layering*) risiko dan kombinasi instrumen pembiayaan. Hal ini penting karena satu instrumen pembiayaan tidak akan mampu menjadi solusi bagi seluruh risiko bencana. Pemerintah akan menentukan risiko-risiko mana yang pembiayaannya ditanggung sendiri (*retain*), pembiayaan risiko yang di transfer, dan bagaimana memilih instrumen yang sesuai.

Untuk melakukan mitigasi risiko potensi kerugian dari bencana alam, pemerintah berinisiatif untuk melakukan transfer risiko kepada pihak asuransi. “Jadi nanti asuransi yang sifatnya katastropik atau asuransi bencana. Itu bisa dilakukan oleh *pooling fund*. Jadi dia nanti berhubungan dengan investor luar. Jadi investor mancanegara atau pasar asuransi, biasanya akan direasuransi lagi,” jelas Irfa.

Menambahkan hal tersebut, Direktur PAPBN, Kunta juga mengungkapkan rencana *piloting project* asuransi bencana tersebut. Dalam APBN 2019, aset Kementerian Keuangan akan menjadi aset pertama yang akan diujicoba melalui skema asuransi bencana.

“Untuk 2019 kita mulai mengasuransikan BMN atau barang milik negara. Ini akan di-*piloting* di

Kementerian Keuangan. Jadi tiap tahun kita akan membayar premi untuk risiko yang akan terjadi akibat bencana. Tapi ini lebih ke arah rehab-rekon atau untuk membangun kembali. Kalau ada kejadian kita bisa dapat asuransi dari perusahaan asuransi. Ini *pilotingnya* di Kementerian Keuangan untuk BMN dari DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Gedung dan segala macam, termasuk mobil juga, tapi baru Kementerian Keuangan. Kalau sukses nanti akan diterapkan ke K/L lain,” papar Kunta.

Mendukung program tersebut, Ahli Perekayasa BPPT dan Kepala Bidang Mitigasi Persatuan Insinyur Indonesia mengungkapkan bahwa asuransi penting terutama untuk menghitung risiko. Risiko harus bisa dihitung dan diklarifikasikan menjadi biaya yang harus ditanggung oleh pihak ketiga dalam hal ini kerjasamanya adalah berupa asuransi. “Ada sektor-sektor publik atau komersial atau industri yang mungkin bisa, seperti perhotelan atau industrial yang ada di pantai dan lain-lain. Kemudian kita harus bekerjasama dengan semua *stakeholders* terutama dari K/L maupun dari pihak industri yang ada di sana, hotel-hotel, dan lain-lain untuk bicara bareng-bareng. Beberapa di tempat lain sudah jalan. Thailand, misalnya, untuk hotel itu ada satu dolar atau berapa dolar lah yang dibebankan ke pengunjung atau konsumen yang menginap di hotel. Dan mereka itu diberitahukan bahwa itu termasuk untuk asuransi gempa bumi atau tsunami. Dan mereka ‘it’s fine’. Tentunya program ini harus berkelanjutan,” jelasnya.

Teks Abdul Aziz



PETA ZONASI JADI DASAR KONSEPSI

Bumi Nanggroe Aceh Darussalam koyak dihantam gempa dan tsunami pada penghujung 2004. Ratusan ribu korban meninggal dan setengah juta lebih orang terlantar. Puluhan ribu rumah, sekolah, serta bangunan infrastruktur luluh lantak. Kerusakan ini tak pernah terbayangkan sebelumnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menyebutnya sebagai bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern manusia.

Di Museum Tsunami, seorang Ibu bersama anak menyaksikan kehancuran Aceh dulu.

Foto
Anas Nur Huda



"Setiap wilayah mesti mendefinisikan ancaman bencananya apa, kebutuhan peralatan yang utama apa, lalu kita *back up* dengan penganggarnya"

Kuntoro Mangkusubroto
Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias 2005-2009

Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias 2005-2009, Kuntoro Mangkusubroto, mengungkapkan saking besarnya bencana tersebut, keesokan paginya pemerintah langsung menyatakan tidak mampu menyediakan dana penanganan bencana yang cukup. Oleh sebab itu, Indonesia membuka pintu lebar-lebar untuk bantuan luar negeri. Namun Kuntoro menegaskan bantuan luar negeri yang masuk adalah hibah. "Kalau bentuknya utang *enggak* usah datang ke *gue*. Jadi, ini *grant*."

Dari total dana 7,2 miliar USD yang dikelola BRR Aceh-Nias, hanya sekitar sepertiganya berasal dari APBN. Kesulitan APBN dalam membiayai penanganan bencana Aceh, menurut Kuntoro, disebabkan oleh belum adanya skema mitigasi dan penanganan bencana yang baik.

"Hal pertama yang mesti ditanya

jika terjadi bencana alam, siapa yang akan membangun kembali? Apakah korban, pemerintah, atau gabungan? Nah, ini tidak terjawab," tutur Kuntoro. Ia mengusulkan pemerintah segera membuat peta zonasi daerah berdasarkan tingkat kerawanan bencana sebagai basis pengembangan pendanaan anggaran bencana.

Dua terobosan pada 2019

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal Irfa Ampri mengakui selama ini pemerintah memiliki keterbatasan dalam pendanaan bencana. Hingga tahun 2018, pemerintah semata mengandalkan dana kontingensi dalam APBN. Besarannya naik turun, dalam 12 tahun terakhir rata-rata senilai Rp4 triliun per tahun.

Ketika tidak terjadi bencana besar, dana kontijensi belum termanfaatkan secara optimal. Sebaliknya saat ada bencana besar, dana tersebut tidak mencukupi. "Lombok saja diperkirakan memerlukan Rp5 triliun, sedangkan Sulawesi Tengah *double* sampai Rp10 trilun," tambah Irfa. Beban APBN menjadi lebih berat lagi bila bencana terjadi pada akhir tahun, seperti terjadi di Aceh. Pembentukan BRR Aceh-Nias kala itu juga dilandasi keterbatasan fiskal pemerintah, sementara di sisi lain nilai kerugian bencana sangatlah besar.

Menyadari tingginya risiko *gap* pembiayaan bencana, jelas Irfa, pada tahun 2019 ini pemerintah melakukan dua terobosan kebijakan. Pertama, mengasuransikan Barang Milik Negara secara bertahap, dimulai dari aset-aset Kementerian Keuangan sebagai *pilot project*. Kedua, mempercepat pembentukan *pooling fund*. Sumber pendanaan

awal *pooling fund* saat ini masih berasal dari APBN, tetapi pada tahap berikutnya diharapkan ada penyertaan dana dari pemda, hasil investasi atas dana yang dikelola, hasil pembayaran klaim asuransi, serta sumbangan dari donatur, termasuk masyarakat, dan filantropis.

Tingkatkan kesiapan daerah

Praktik asuransi aset pemerintah sudah diterapkan terlebih dulu oleh Kota Padang. Dana APBD Padang yang digunakan untuk mengasuransikan aset Barang Milik Daerah adalah sebesar Rp4 miliar. Irfa berharap, langkah mitigasi bencana tersebut turut diikuti oleh pemda-pemda lain di Indonesia. "Melalui Kemendagri, kita akan mendorong pemda untuk mengasuransikan aset-asetnya, baik melalui asuransi umum maupun *pooling fund*," tutur Irfa.

Sementara itu, Kuntoro berpendapat terdapat tiga hal utama yang perlu disiapkan pemda. Pertama, membuat *mapping* dan *evacuating route*. Kedua, memperkuat organisasi baik dari kualitas SDM, sistem, maupun prosedur penanganan bencana. Ketiga, menghindari unsur politis. Penentuan apakah pemda atau pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas penanganan bencana harus apolitis, yaitu dengan melihat skala, luas jangkauan, tipe, dan jumlah kerugian.

Pentingnya konsepsi

"Penganggaran rekonstruksi pascabencana tidak sekadar masalah birokrasi seputar jumlah dana dan penyaluran, tetapi mesti berangkat dari konsepsi," tegas Kuntoro. Jika pemerintah tidak memiliki konsep mitigasi bencana yang jelas, APBN akan terus jebol. Transfer risiko melalui asuransi untuk pembiayaan bencana akan memperkecil biaya rekonstruksi pascabencana. Menurutnya, peta zonasi daerah rawan bencana merupakan hal paling esensial dalam konsep mitigasi bencana.

Pemerintah juga perlu membedakan spesifikasi kebutuhan peralatan dan dana bencana tiap daerah. Hal ini lantaran sifat bencana alam tiap daerah berbeda satu sama lain sehingga mengharuskan cara penanganan yang tidak sama. "Mitigasi dan rekonstruksi pascabencana sangat bergantung kepada tipe ancaman bencana alam yang mungkin terjadi di daerah itu," ujar Kuntoro.

Teks Reni Saptati D.I.

PEMBIAYAAN BENCANA DI INDONESIA

Askolani,
Direktur
Jenderal
Anggaran

Foto
Anas Nur
Huda

Tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan bencana datang. Para ahli, geolog, vulkanolog bisa memprediksi terjadinya bencana alam. Namun, kepastian waktunya sulit dideteksi. Menurut Bank Dunia, Indonesia termasuk ke dalam 35 negara di dunia dengan risiko tinggi terjadinya korban jiwa akibat berbagai jenis bencana. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terpapar risiko ini. Kerugian ekonomi, fisik, dan korban jiwa akibat gempa tercatat sangat tinggi. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai fokus pemerintah menanggulangi kerugian akibat bencana alam, simak wawancara Media Keuangan dengan Direktur Jenderal Anggaran, Askolani berikut ini.

Bagaimana penganggaran yang disiapkan pemerintah selama ini dalam memitigasi risiko bencana?

Dalam hal mitigasi penanggulangan bencana, setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana cadangan bencana yang utamanya untuk kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana. Lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selain itu, pemerintah juga sudah mengembangkan skema asuransi di beberapa sektor, seperti asuransi pertanian, asuransi pembudidayaan ikan dan pergarman, dan asuransi Barang Milik Negara (*Piloting BMN Kemenkeu* 2019). Namun di luar itu, Pemerintah

Tahukah kamu?



Indonesia hanya membutuhkan waktu dua hari saja, setelah proklamasi kemerdekaan, untuk membentuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI). Bersama dengan 11 kementerian lain, Kemenkeu RI dibentuk pada 19 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pembentukan ini dilakukan satu hari setelah PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, serta menetapkan Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama.

Sebelum berlakunya Oeang Republik Indonesia (ORI), pemerintah mulai membatasi penggunaan dan peredaran mata uang Belanda (Gulden). Satu bulan setelah merdeka, tiap penduduk hanya dibolehkan memiliki 50 gulden. Artinya, total mata uang Belanda yang beredar pada masa itu, diperkirakan sebesar 2,2 milyar gulden, dengan jumlah penduduk sebanyak 44 juta jiwa.

Emisi pertama uang kertas ORI terbit pertama kali pada 30 Oktober 1946. Selanjutnya dikenal sebagai Hari Oeang RI. Emisi pertama uang kertas ORI yang dicetak pertama kali terdiri dari pecahan bernilai satu sen, sepuluh sen, dan lima puluh sen. Selanjutnya, menyusul pecahan lain, yaitu satu rupiah, lima rupiah, sepuluh rupiah, dan seratus rupiah.

melalui beberapa instansi seperti BMKG dan BPPT juga melakukan kegiatan mitigasi terkait pembangunan sistem peringatan dini, serta pengembangan teknologi ramah bencana.

Dulu kalau kita ingat habis kejadian gempa dan tsunami di Aceh, gempa di Padang, pemerintah cukup *massive* menyediakan alat-alat deteksi di laut dalam bentuk *Buoy*, tapi kemudian *maintenance*-nya tidak jalan. Alat-alat *Buoy* yang ada di laut itu malah diambil orang, karena tidak ada yang jaga, juga tidak berfungsi kembali, sehingga investasi beberapa tahun yang lalu hilang. Nah ini yang menjadi tantangan.

Apakah besaran anggaran yang tersedia selama ini setara dengan ancaman bencana yang ada?

Bencana alam merupakan fenomena yang sulit diprediksi sehingga pengalokasian anggarannya tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, selain mengalokasikan dana siap pakai (*on call*) di DIPA BNPB untuk kegiatan tanggap darurat, pemerintah juga mengalokasikan anggaran dana cadangan bencana di DIPA BA BUN (Kementerian Keuangan) untuk kegiatan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi.

Apabila dana siap pakai yang ada di BNPB tidak mencukupi, maka BNPB dapat mengajukan permohonan penambahan dana siap pakai tanggap darurat ke Kementerian Keuangan. Penggunaan dana cadangan bencana tersebut dapat dilakukan oleh Kementerian Lembaga atau dihibahkan ke daerah untuk rehabilitasi rekonstruksi melalui koordinasi BNPB.

Bagaimana APBN memenuhi kebutuhan terhadap penanganan bencana?

Anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN terdiri dari dana kontingensi bencana (cadangan bencana) untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana, dana siap pakai yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk tahap tanggap darurat, dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Kementerian/Lembaga, dana hibah kepada PEMDA. Selain itu, sumber pendanaan bencana berasal dari bantuan masyarakat langsung kepada para korban bencana, baik dalam bentuk dana atau barang.

Dalam menghadapi bencana terutama bencana dalam skala besar, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada lembaga usaha dan lembaga internasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagaimana peran pemerintah terhadap kondisi pasca bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi?

Untuk pemulihan atau tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pemerintah mengalokasikan anggaran melalui Kementerian/Lembaga dan juga hibah kepada pemerintah daerah. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah, pemda dapat mengajukan kepada pemerintah pusat melalui BNPB untuk diberikan bantuan dalam bentuk dana bantuan sosial berpola hibah.

Bagaimana upaya pemerintah bersinergi antar K/L untuk bersatu memitigasi bencana?

Setelah menghadapi pascabencana beberapa bulan ini, pemerintah sedang mengkoordinasikan untuk menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran untuk mitigasi. Ini dilakukan di-*lead* oleh Menko Maritim untuk bisa perencanaan penganggaran untuk mitigasi pra bencana yang masih menghadapi tantangan.

Diskusi di Menko Maritim banyak K/L yang terlibat, sebab untuk mitigasi ini banyak *stakeholder* yang bertanggung jawab. Ada BMKG, ESDM, BPPT,

mungkin BNPB juga ikut. Nah ini kita koordinasikan untuk menyusun rancangan untuk mitigasi. Mitigasi ini tadi kita mungkin agak dominan untuk membeli aset-aset perangkat untuk mitigasi, untuk deteksi tsunami, untuk deteksi bencana di laut, untuk mendeteksi bencana di darat. Nah ini yang pemerintah lagi lakukan, Menko Maritim *lead*-nya untuk mendesain perencanaan mitigasi ini untuk jangka menengah, jadi bukan hanya setahun.

Bagaimana Pemerintah Indonesia mengadaptasi Disaster Risk and Financing Insurance (DRFI)?

Pemerintah sedang terus mengupayakan Pengembangan Kebijakan dan Skema Pembiayaan Risiko Bencana yang inovatif untuk keperluan pembiayaan *ex-ante* dan *ex-post* (Strategi Pembiayaan Bencana Nasional atau Disaster Risk Financing Insurance/DRFI). Saat ini Pemerintah sedang menyiapkan regulasi, bentuk kelembagaan, mekanisme pendanaan bencana melalui *pooling fund*. Dengan terbentuknya *pooling fund*, diharapkan pendanaan bencana dapat dipenuhi, sehingga dapat dapat mengurangi resiko kerugian akibat bencana. Pengembangan skema DRFI dikoordinatori oleh Kemenkeu.

Teks Dianita S

Deteksi Dini Gangguan Mata Cegah Kebutaan

Angka kebutaan di Indonesia cukup tinggi, padahal sebagian besar kebutaan bisa dicegah dengan deteksi dini. Dr. Gitalisa Andayani, SpM(K), Humas Perdami (Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia), menjelaskan kepada Media Keuangan, apa saja hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kebutaan dan menjaga kesehatan mata.

Berapa persen angka gangguan penglihatan di Indonesia?

Berdasarkan hasil survei kesehatan nasional tahun 1993-1996, angka kebutaan kita mencapai 1,5 persen populasi. Barangkali agak miris, data terbaru Kementerian Kesehatan menunjukkan angka lebih besar lagi. Pada tahun 2013, angka kebutaan di Nusa Tenggara Barat mencapai 4 persen, Sulawesi Selatan 2,3 persen, dan Jawa Barat 2,2 persen. Data terakhir tersebut masih berdasarkan wilayah dan belum ada *pool* nasional. Namun, mudah-mudahan sekarang segera ada *pool* nasional, lantaran pada saat perayaan *World Sight Day* 2018 di Surabaya beberapa waktu lalu, telah diresmikan program strategi penanganan kebutaan nasional.

25-40
persen lebih
orang di
wilayah Asia
memakai
kacamata

Foto
Anas Nur Huda

Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kebutaan?

Penyebab kebutaan bermacam-macam, nomor satu katarak. Faktor risiko terkena katarak banyak, tetapi yang paling utama di Indonesia adalah penuaan. Hal ini diperberat dengan lokasi geografis Indonesia di daerah khatulistiwa yang memiliki tingkat paparan ultraviolet tinggi, sehingga risiko terkena katarak lebih besar. Operasi menjadi terapi definitif untuk katarak dan harus dilakukan secara masif. Nah, kendalanya banyak, mulai dari pendanaan hingga operasional.

Kendala berikutnya adalah kondisi geografis kita yang berupa kepulauan. Pulau kecil di pelosok sulit diakses. Faktor genetik juga dapat mempengaruhi tingkat kebutaan, sebab penyakit yang punya predisposisi genetik seperti glaukoma dan degenerasi makula menjadi salah satu

penyebab utama kebutaan.

Satu hal lagi, kebutaan anak akibat teknologi juga perlu diwaspadai. Mereka bisa terkena katarak kongenital dan retinopati prematur. Jumlahnya sedikit, tetapi mempengaruhi kelompok usia sensitif. Belum semua anak Indonesia punya akses untuk koreksi refraksi melalui penggunaan kacamata. Orang tuanya terkadang tidak cukup *care* atau *aware* atas kelainan refraksi pada anak sehingga tidak ada upaya memberikan kacamata. Pemikiran “anak kalau bisa jangan pakai kacamata” adalah keliru. Tumbuh kembang anak akan terganggu dan dia bisa mengalami ambliopia atau *lazy eye*. Fungsi retinanya tidak berkembang maksimal karena terbiasa melihat dengan kualitas penglihatan yang kurang. Jika ada pendapat bahwa minus mata akan bertambah kalau memakai kacamata, itu juga mitos.

Bagaimana cara mendeteksi dini masalah kebutaan?

Usaha kami mendeteksi dini kebutaan pada usia dewasa adalah dengan melakukan skrining katarak, baik dari pasien kelas primer, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), maupun program skrining massal dalam kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*). BUMN dan perusahaan swasta sering bekerja sama dengan kami untuk melakukan skrining katarak. Tidak hanya dari pihak medis dokter mata, Gapopin (Gabungan Pengusaha Optik Indonesia), dan Iropin (Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia) juga kerap menyelenggarakan skrining ke sekolah-sekolah untuk mendeteksi kelainan refraksi pada anak-anak. Ada dua agenda utama persatuan profesi kami, yakni memberantas kebutaan akibat katarak dan mengatasi gangguan refraksi.

Usia anak-anak memang rentan sekali. Mereka harus secepat mungkin dideteksi jika ada kelainan. Secara umum, 25-40 persen lebih orang di wilayah Asia memakai kacamata, terutama akibat rabun jauh. Kultur Asia memang PR-nya banyak dan belajarnya banyak memakai *gadget*.

Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata?

Kebiasaan baik perlu dibangun. Makanan bergizi seperti sayur dan buah merupakan modal dasar untuk perkembangan dan metabolisme mata. Mata butuh vitamin A, C, E, dan lutein. Lutein banyak terdapat di sayur dan buah, terutama tomat. Betakaroten banyak di wortel serta semua sayur dan buah berspektrum oranye, kuning, dan merah. Vitamin A penting untuk mata karena jika terjadi defisiensi dapat menimbulkan rabun senja dan mata kering.



Dr. Gitalisa Andayani,
SpM(K), Humas Perdami.

Foto
Resha Aditya

Tips lain untuk menjaga kesehatan mata adalah melakukan kegiatan dalam pencahayaan yang baik, membaca dengan *proper* dalam posisi baik dan jarak baca ideal, serta segera melakukan koreksi jika terjadi kelainan refraksi.

Ada pendapat bahwa melihat jarak dekat terus menerus dalam masa tumbuh kembang dapat menginduksi rabun jauh, contohnya dalam penggunaan ponsel. Namun, terkadang orang terlalu berlebih-lebihkan. Ponsel sekarang sudah canggih sehingga *blue light*-nya sangat minim radiasi. Bukti-bukti ilmiah tidak menunjukkan radiasi ponsel menimbulkan kerusakan mata, tetapi memang dapat menimbulkan gangguan kelelahan mata yang menginduksi miopia.

Untuk itu, pada usia anak hingga 12 tahun atau sampai usia SD, perlu ada keseimbangan antara kegiatan membaca dekat dengan olahraga atau kegiatan luar. Saat berkegiatan luar, anak akan memandang jauh sehingga matanya menjadi relaks. Secara teori, efek sinar matahari mampu merangsang dopamin dan mencegah perpanjangan sumbu bola mata. Mungkin hal ini menjelaskan mengapa orang di kampung lebih sedikit yang bermata minus. Berbeda dengan anak di perkotaan yang memiliki banyak tugas belajar dan masih mengikuti ekstra kurikuler.

Kebiasaan lain yang baik terutama bila kita udah menginjak usia 40 tahun adalah *check up* berkala. Kita bisa mendeteksi gangguan anatomi semiminal mungkin dan melakukan intervensi sedini mungkin jika perlu.

Tantangan lain apa lagi yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan mata?

Kewaspadaan masyarakat kurang, mungkin lantaran faktor ekonomi dan sosial. Adanya BPJS (Badan Penyelenggara Jasa Sosial) sangat membantu masyarakat. Mereka tetap bisa mengakses pelayanan kesehatan meski dana terbatas. Sebagai praktisi, kami merasakan sekali manfaat BPJS bagi masyarakat.

Jika dulu yang berobat ke RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) hanya sekitar 100 orang, sekarang bisa meningkat hingga 400 orang.

Ketergantungan pasien dengan orang lain juga menjadi kendala. Selain itu, banyak pasien terlalu pasrah dan menilai kelainan mata mereka adalah takdir. Banyak pula yang takut menjalani operasi katarak. Komplikasi atau risiko operasi katarak hanya sekitar 1-2 persen, tetapi mereka seperti mendiskreditkan tindakan operasi katarak. Pasien yang sudah tertolong jauh lebih banyak. Oleh karena itu, sekarang kami memiliki *informed consent* yang menyebutkan risiko operasi dan komplikasi. Kami membina komunikasi yang baik dengan pasien sebelum operasi. Kami jelaskan semua efek samping sehingga pengetahuan mereka bertambah dan mereka makin *aware*.

Apa saja upaya Perdami dalam melayani kesehatan mata masyarakat kurang mampu?

Kami mengadakan bakti sosial (baksos) untuk masyarakat. Perdami memiliki dana untuk baksos, tetapi biasanya juga terdapat penyanggah dana lain. Ada dari pemda, CSR (*Corporate Social Responsibility*), dan NGO (*Non Governmental Organizations*). Kami aktif mencari mitra dan mereka memang ingin menyalurkan dananya. CSR menyalurkan dana perusahaan, sedangkan NGO menyalurkan dana para donatur dan filantropi.

Kami sangat berterima kasih kepada mereka sebab telah membantu kami mengadakan layanan kesehatan mata. Beberapa organisasi bahkan sampai membantu mendatangkan pasien karena mereka mengalami kesulitan transportasi. Selain itu, kami juga sering datang ke sekolah untuk skrining pada anak. Terkadang, pihak sekolah membantu dengan melaporkan anak-anak yang ditengarai memiliki kelainan mata.

Teks Irma Kesuma



KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

ALPHA (Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan)

adalah aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban pembuatan, pengisian, dan penyampaian **Laporan Harta Kekayaan (LHK)** dan **Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)** untuk seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, sesuai dengan:

KMK nomor 277/KMK.09/2017

tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pajak-Pajak Pribadi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan

KEP IRJEN nomor 12/IJ/2018

tentang Petunjuk Teknis Pengisian Laporan Harta Kekayaan dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi dan Penggunaan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan

Ada **ALPHA** di **Kemenkeu**



TERINTEGRASI
e-Prime • **HRIS** • **LHK** • **LP2P**
single login data kepegawaian LHKASN LHKPN* SPT*

*) ALPHA diharapkan dapat menjadi fasilitas bagi para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk memenuhi seluruh kewajiban pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pribadi dalam satu tahap. Saat ini ALPHA telah digunakan untuk melakukan pelaporan LP2P dan LHKASN. Inspektorat Jenderal terus mengupayakan agar pelaporan SPT PPh OP tahunan dan LHKPN dapat terakomodasi juga melalui ALPHA.



Membangun Relasi dengan Komunikasi

Syarif Hidayat

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Foto
Anas Nur Huda

B erawal dari kegemaran dalam membuat pemancar radio, sekelompok pemuda menumbuhkan minatnya menjadi hobi berkomunikasi menggunakan media *Handy Talkie* (HT). Terdapat satu pemuda di tengah-tengahnya, Syarif Hidayat namanya. Pemuda kelahiran Cianjur, Jawa Barat yang mengikuti tren alat komunikasi HT di era 80an itu kini menjabat sebagai Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga (KIAL) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, turut menggunakan HT sebagai alat komunikasi utamanya.

Tidak berhenti sampai di situ, Syarif Hidayat muda semakin mendalami hobinya dengan memulai menggunakan *High Frequency* (HF) untuk komunikasi jarak jauh hingga mampu berkomunikasi antarnegara melalui kode morse dan berbagai bahasa asing. Memang benar kata pepatah, “Jangan pernah ragu melakukan apa yang membuatmu bahagia”.

Berbekal pengalaman dalam berkomunikasi hingga level internasional tersebut menjadi salah satu modal berharga baginya. Dengan dukungan kerja keras ditambah dengan kemampuan uniknya tersebut, ia berhasil memperoleh beasiswa Master of Science in Policy Economics di University of Illinois, Amerika Serikat. Tidak hanya itu, karir Syarif juga bersinar dengan dipercaya menjadi Atase Keuangan dan Bea Cukai Kedutaan Besar Indonesia di Jepang pada tahun 2010 hingga 2014. Selain itu, ia juga pernah diamanahi sebagai Chairman Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Sub Committee on Customs Procedure pada 2013.

Pengalaman bekerja di luar negeri, menurut Syarif mampu membuka perspektif baru dan membuka khazanah keilmuan melalui interaksi sosial dengan

lingkungan yang tentunya sangat berbeda dengan lingkungan asal kita. Syarif dituntut mampu beradaptasi dengan baik juga menjadi sosok yang mampu merepresentasikan Bea Cukai di mata internasional.

Dengan berbagai pengalaman di level dunia, tentunya menjadi salah satu pelajaran berharga bagi Syarif. Ia belajar banyak hal terkait budaya, nilai hidup, kedisiplinan serta kejujuran. “Begitu kita ke luar negeri, banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa ambil. Misalkan seperti di Jepang itu setiap orang itu bisa dipercaya, kemudian juga sangat baik, sangat *helpful* terhadap orang lain yang bahkan baru mereka kenal,” kenangnya.

Dari farmasi

Memiliki latar belakang pendidikan sarjana di bidang farmasi tidak lantas membuat Syarif muda gentar. Syarif yang pada waktu itu merasa awam dengan Bea Cukai mencoba peruntungan dengan mengikuti pendaftaran CPNS Kementerian Keuangan di koran yang mencantumkan jurusan farmasi sebagai salah satu jurusan yang dibutuhkan. Ia pun memberanikan diri untuk mendaftar, dan semesta pun mendukung. Saat itu DJBC memang membutuhkan tenaga ahli di Kantor Loka Pengujian dan Identifikasi Barang, Laboratorium Bea Cukai Jakarta. Ia pun berhasil diterima dan menjadi ahli analis di tempat tersebut.

Tidak berhenti di situ, kondisi laboratorium yang masih belum berkembang dengan baik serta tantangan yang semakin tinggi ke depannya membuat Syarif berkeinginan untuk meningkatkan kemampuannya. Untuk itu, ia pun mengikuti kursus analis kimia di Jepang pada tahun 1993 agar bisa menjadi ahli di bidang analis dan meningkatkan kinerja unitnya. Tak lama berselang, ia melanjutkan pendidikan ke Amerika pada

tahun 1996. Paska kembali dari tugas pendidikan, ia pun dipercaya menjabat posisi penting menjadi Atase BC di Jepang, kemudian Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dan terakhir dilantik menjadi Direktur KIAL pada 21 November 2018 yang lalu.

Saat menjadi Atase, ia mendapatkan banyak pengalaman internasional yang baru. Dengan lingkungan dan budaya yang berbeda, ia tidak hanya harus bekerja dengan para diplomat Indonesia, namun ia juga harus menjalin koordinasi dengan pihak dari negara lain, seperti *Japan Customs*. “Hal pertama yang membuat berkesan menjadi Atase adalah bekerja di luar lingkungan Bea Cukai, di lingkungan Kementerian Luar Negeri, serta posisinya di luar negeri pula. Saya banyak membangun komunikasi dan hubungan dengan teman-teman Kemenlu dan juga *stakeholder* yang sangat bervariasi di Jepang,” ungkapnya.

Di sisi lain, ada cerita menarik ketika ia menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT. Bali yang berada dalam wilayah kerjanya sering menjadi tujuan diselenggarakannya kegiatan-kegiatan bertaraf internasional. Ia pun harus bekerja ekstra untuk mendukung keberhasilan dari setiap acara pemerintah yang diselenggarakan di Bali. Tak luput kegiatan pertemuan tahunan World Bank - International Monetary Fund (WB-IMF) yang diselenggarakan bulan Oktober 2018 lalu. Pelantikannya menjadi Direktur KIAL pun sempat diundur karena ia masih harus menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua Koordinasi Dukungan Bandara Bali yang membawahi PT Angkasa Pura, Imigrasi, Perhubungan, dan Karantina. Menurutnnya, kesuksesan acara tersebut menjadi salah satu kebanggaan tersendiri baginya. Hal itu tidak hanya menunjukkan keberhasilan Kementerian Keuangan saja, namun juga

meningkatkan reputasi Pemerintah Indonesia di mata dunia.

Pesan kejujuran

Sosok kedua orang tua Syarif yang merupakan guru menjadi salah satu inspirasi utama dirinya. Sang Ayah, Syafei, dan sang Ibu, Nurmalia, selalu berpesan agar dirinya mampu menjaga integritas dan selalu memelihara kejujuran. Pesan itulah yang selalu ia kenang dan masih berbekas dalam dirinya hingga kini.

“Waktu saya mau masuk kerja ke Bea Cukai, pesan pertama orang tua yang disampaikan itu adalah ‘Syarif, kamu jangan kasih makan anak istrimu dengan uang haram!’, itu tuh saya ingat sampai sekarang,” ujarnya sembari mengingat-ingat.

Berlatar belakang pendidikan, kedua orang tuanya juga senantiasa menanamkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, selepas magrib, sudah menjadi rutinitas bagi dirinya dan kelima saudaranya untuk duduk di depan meja belajar. Sudah menjadi kewajiban bagi kedua orang tuanya rutin memeriksa pelajaran anak-anaknya sembari membantu apabila mengalami kesulitan.

Aktivitas

Meski memiliki agenda yang padat, Syarif selalu menyempatkan berkomunikasi meski hanya melalui pesan elektronik, dengan kedua anaknya Julian Arsyad dan Alvin Januar. Bahkan sang istri, Kristianti Retno Purwanti, membuat grup khusus keluarga untuk berbagi informasi dan kondisi masing-masing anggota keluarga. Dengan begitu, hubungan harmonis keluarga masih terus terjaga.

Di tengah jadwalnya yang padat Syarif berupaya untuk menjaga kesehatannya dengan menyempatkan diri berolahraga. Ia memiliki banyak hobi olahraga, khususnya untuk berkendara *off-road*. Ia mempunyai mobil khusus 4x4 untuk jalan di medan terjal dan menantang. Bahkan ia sempat membentuk klub khusus *off-road* di sekitar Jakarta. Hal itu juga ia manfaatkan untuk mengisi waktu luang bersama dengan kedua anaknya. Ia beberapa kali mengajak sang anak untuk mendampingi kegiatan *off-road*.

Harapan

Sebagai seorang tengah memegang jabatan strategis dalam sebuah institusi, Syarif memiliki harapan agar DJBC maupun Kementerian Keuangan tetap menjadi institusi yang terbaik sampai kapan pun. Hal itu merupakan hasil dari perjalanan panjang berbagai pihak dalam upaya menegakkan integritas. “Kemarin kan Pak Dirjen BC mendapatkan Bung Hatta *Anti-Corruption Award*. Jadi itu jelas adalah prestasi kita keseluruhan karena beliau memimpin kita untuk menegakkan disiplin, menegakkan integritas, dan tidak lagi bermain-main dengan apa yang disebut dengan integritas, mudah-mudahan ini bisa bertahan terus,” harapnya.

Untuk itu, ia menaruh harapan besar terhadap proses



reformasi birokrasi yang tengah diinisiasi oleh Kementerian Keuangan. Ia juga berharap agar gaung dan semangat reformasi juga mampu membawa institusi lain menuju ke pemerintahan yang lebih baik lagi.

Bagi dirinya sendiri, ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Kementerian Keuangan. “Kerja itu jangan pamrih, tetapi lakukan yang terbaik. Apa yang bisa terbaik kita lakukan, lakukan itu. Biarkan orang lain yang menilai, biarkan Tuhan yang menilai, biarkan pimpinan kita yang menilai. Saya melihat pimpinan Kementerian Keuangan itu sangat-sangat objektif,” ungkapny.

Sementara itu, ia juga masih memiliki keinginan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dengan bekerja di organisasi internasional. “Misalnya, saya ingin menjadi ekonom di World Bank, makanya saya juga masih tetap menjaga dan belajar tentang makro ekonomi, itu tetap saya pelajari, tentang perbankan itu tetap saya pelajari. Kalau ada kesempatan mudah-mudahan bisa terwujud,” harapnya menutup wawancara dengan Media Keuangan.

Teks Abdul Aziz

Berlibur bersama keluarga di Gunung Fuji, Jepang.

Off Road bersama komunitas

Foto
Dok. Pribadi

Opini

Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Amanah Rahmatika dan Randi Mesarino

Aparatur Sipil Negara, Biro Hukum Sekretariat Jenderal

Runtuhnya Lehman Brothers pada September 2008 lalu merupakan titik puncak dimulainya krisis keuangan yang melanda dunia. Berdasarkan temuan dari *The Financial Crisis Inquiry Commision’s Final Report* pada 2011, krisis tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa diantaranya yaitu perluasan kegagalan dalam regulasi keuangan, tata kelola perusahaan yang terlalu berisiko, serta pencampuran transaksi antara pinjaman dan risiko yang berlebihan dalam sistem keuangan yang dilakukan oleh Wall Street dan rumah tangga. Selain itu, adanya ketidaksiapan para pemangku kebijakan dalam memahami indikator-indikator krisis sistem keuangan, termasuk juga pelanggaran etika dan akuntabilitas di setiap level secara sistemik.

Penyematan teori “*too big to fail*” kepada institusi keuangan, khususnya bank, berlaku dalam peristiwa ini. Hal ini menjelaskan bahwa kegagalan suatu bank besar yang memiliki interkoneksi tinggi dengan sistem keuangan

lain bisa berdampak negatif pada sistem perekonomian yang lebih luas. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan upaya untuk menghindari adanya potensi kegagalan yang lebih besar.

Kewajiban pemerintah untuk melakukan penyelamatan terhadap bank sistemik, secara implisit, memberikan jaminan atas kelangsungan bank-bank besar tersebut. Namun, hal ini kemudian juga banyak menuai kritik dengan alasan dapat berpotensi menimbulkan *irresponsible behaviour* atau *moral hazard*. Untuk itulah, perlu dibentuk suatu regulasi guna mengatasi permasalahan tersebut.

Berangkat dari hal tersebut, sebagai respons atas krisis keuangan tahun 2008, maka pada 2010, Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menerbitkan *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer*

Protection Act. Tujuan dari pembentukan undang-undang (UU) tersebut adalah untuk mengurangi berbagai risiko yang mungkin menerpa sistem keuangan AS. Salah satunya melalui pemantauan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan oleh beberapa lembaga, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.



Pemantauan stabilitas keuangan tersebut mencakup pada institusi keuangan, khususnya bank, yang kegagalannya memiliki dampak negatif secara luas terhadap perekonomian (berdampak sistemik). Selain itu, mencakup juga penekanan pada dimulainya rezim kebijakan *bail-in*. Kebijakan ini menetapkan bahwa uang negara hasil pungutan pajak tidak akan digunakan untuk menyelamatkan bank berdampak sistemik tersebut.

Di Indonesia sendiri, saat ini telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Penerbitan UU ini dilakukan rangka membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan siap dalam menghadapi krisis sistem keuangan. Fokus dari UU ini adalah pada mekanisme koordinasi antarlembaga dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan, sekaligus melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh lembaga secara sendiri-sendiri sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Tidak

hanya itu, serupa dengan *Dodd-Frank Act*, UU PPKSK juga menanamkan rezim *bail-in* sebagai salah satu upaya penanganan permasalahan bank sistemik.

Penerbitan UU PPKSK tersebut merupakan suatu terobosan hukum di Indonesia di bidang sistem keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyusun dan menerapkan kebijakan strategis di berbagai sektor keuangan. UU ini juga menjadi landasan hukum bagi lembaga yang berwenang untuk berkoordinasi dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan.

Tantangan dan Regulasi di Indonesia

Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejala. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor *structural*, maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber

Penerbitan UU PPKSK tersebut merupakan suatu terobosan hukum di Indonesia di bidang sistem keuangan

dari eksternal (internasional) maupun internal (domestik).

Meningkatnya kecenderungan globalisasi sektor finansial yang didukung oleh perkembangan teknologi menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi, tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Selain itu, inovasi produk keuangan semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Berbagai perkembangan tersebut dapat mengakibatkan sumber-sumber pemicu ketidakstabilan sistem keuangan meningkat dan semakin beragam. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut.

Beberapa risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan, antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Dalam rangka menjawab tantangan khususnya terkait beberapa risiko tersebut, UU PPKSK telah mengatur skema pencegahan dan penanganan krisis yang terkoordinasi antar empat lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Keempat lembaga tersebut diwadahi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik, sebagai bagian penting dari sistem keuangan, merupakan titik berat pengaturan UU PPKSK ini. Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan, dan penanganan permasalahan sistem keuangan dilakukan juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran.

Hal tersebut didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif. Hal ini, selanjutnya berdampak langsung pada jalannya roda perekonomian.

Kedua, sebagian besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan, khususnya bank sistemik. Oleh sebab itu, perlu dijaga keamanannya dari kemungkinan kegagalan bank.

Guna menangani permasalahan bank, dalam UU PPKSK, diterapkan konsep *bail-in* melalui penggunaan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis, tanpa menggunakan anggaran negara. Jika upaya penanganan ini belum dapat mengatasi permasalahan, penanganan permasalahan bank dilakukan dengan dua cara. Untuk penanganan kesulitan likuiditas dilakukan melalui dukungan BI, sedangkan untuk penanganan masalah solvabilitas dilakukan melalui LPS.

Selanjutnya, UU PPKSK mengatur bahwa berdasarkan rekomendasi KSSK, Presiden dapat memutuskan diselenggarakannya program restrukturisasi perbankan oleh LPS. Hal ini apabila dalam kondisi krisis sistem keuangan, terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan

perekonomian nasional. Melalui program restrukturisasi perbankan tersebut, LPS diberikan serangkaian kewenangan untuk menangani permasalahan bank, baik bank sistemik maupun bank selain bank sistemik, yang dianggap membahayakan perekonomian nasional.

Meski demikian, Indonesia masih memiliki tantangan dari sisi internal yang berpotensi menimbulkan krisis sistem keuangan. Tantangan ini antara lain dapat timbul dari segi koordinasi antarlembaga anggota KSSK, maupun peraturan pelaksanaan yang masih dalam pengkajian dan penyusunan secara lebih komprehensif.

Selain tantangan dari internal, tantangan eksternal berupa pergerakan ekonomi global juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dikutip dari laman berita Kontan, Mark Mobius, seorang mantan *Executive Chairman Franklin Templeton Investments*, meramalkan bahwa efek perang dagang dan penguatan kurs dollar AS telah membebani pasar keuangan. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi ketatnya likuiditas karena tindakan *The Federal Reserve* dan Bank Sentral Eropa yang menormalkan kebijakan moneter melalui upaya menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga tersebut dapat menyebabkan era pendanaan murah berakhir dan berpotensi memantik krisis sistem keuangan.

Untuk menghadapi tantangan dari sisi internal dan eksternal, baik di masa sekarang maupun yang akan datang, maka sudah sepatutnya perlu dilakukan penguatan koordinasi antarlembaga yang menaungi bidang stabilitas sistem keuangan. Koordinasi dan *trust building* antarlembaga anggota KSSK menjadi kata kunci penentu keberhasilan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan di Indonesia.



Generasi Milenial Di Bangku Birokrasi

Rendra Ahmad Mawardi,
Aparatur Sipil Negara, KPPBC TMP A Bogor

Generasi milenial pada dasarnya adalah sebutan untuk kelompok demografi setelah generasi X. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir tahun kelahiran kelompok ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Namun, dilihat dari pola pikir dan budayanya, generasi milenial justru lebih cocok disematkan pada kelompok dengan tahun kelahiran sekitar tahun 1990-an hingga awal 2000-an.

Menurut berbagai sumber, generasi

milenial secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu *the student millennial*, *the working millennial*, dan *the family millennial*. Mereka yang lahir pada tahun 1993–2000 masuk ke dalam kelompok *the student millennial* di mana kehidupan mereka telah banyak dipengaruhi oleh telepon pintar sejak dini. Penggunaan teknologi dan akses media sosial terdengar sangat akrab dengan keseharian mereka.

Ada pula *the working millennial* yang lahir pada tahun 1987–1993. Mereka lahir saat televisi sudah berwarna. Namun, mereka baru bersinggungan dengan telepon genggam dan internet ketika duduk di bangku SMA. Meski banyak inspirasi untuk menjadi pengusaha atau pebisnis, *the working millennial* didominasi oleh pekerja kantoran yang menganggap jenis pekerjaan itu sebagai patokan utama kesuksesan mereka.

Sementara itu, mereka yang lahir pada tahun 1980–1987 dikelompokkan sebagai *the family milenial*. Mereka menjadi saksi perpindahan dunia analog ke dunia digital dan mengalami masa reformasi tahun 1998 yang mengubah banyak aspek di Indonesia. Kelompok ini sudah lebih matang dan memikirkan rencana berkeluarga atau tengah menjalani fase membentuk sebuah keluarga.

Generasi milenial memiliki karakteristik yang jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Bahkan, terlepas dari sifat dasar mereka masing-masing, cara berpikir mereka relatif sama. Cara kerja mereka yang serba digital dan berbasis teknologi membuat mereka memiliki cara pandang yang praktis dalam bekerja. Mereka sangat memahami perkembangan teknologi yang dapat mereka gunakan sebagai sarana meningkatkan kompetensi dan kualitas dalam bekerja. Selain itu, mereka identik dengan kebebasan dan tidak suka jika terlalu banyak diatur.

Bila ditinjau dari cara berpikir,

generasi milenial cenderung menghindari pekerjaan yang membutuhkan cara penyelesaian rumit. Mereka tidak memiliki cukup kesabaran untuk menghadapi pekerjaan berbelit, sebab mereka merasa pasti ada solusi atau cara lain yang lebih mudah dalam penyelesaiannya.

Lalu, bagaimana jadinya bila generasi milenial menduduki posisi sebagai pelaku birokrasi atau Aparatur Sipil Negara (ASN)? Sekarang saja generasi milenial mendominasi hampir seluruh instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Belum lagi ditambah dengan jumlah pelamar Calon ASN tahun 2018 yang mencapai 6 juta pelamar. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa jumlah ASN akan terus didominasi oleh generasi milenial.

Dilihat dari karakteristik mereka yang memiliki kecenderungan tidak suka diatur dan berpikir kreatif dalam bekerja, para ASN dari generasi milenial tidak jarang mengalami benturan kultur dengan generasi sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya celah usia yang mempengaruhi cara pandang dan kebiasaan kerja.

Kerap kali, generasi sebelumnya menganggap generasi milenial memiliki banyak karakter negatif. Misalnya, mereka menghendaki semuanya serba cepat dan instan, tidak mau susah, narsistik, pemalas, dan senang melompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Meski demikian, generasi milenial ternyata dapat diandalkan. Mereka juga dapat membawa keuntungan bagi organisasi apabila diarahkan dan diperlakukan secara proporsional sesuai kapasitasnya.

Generasi milenial yang kehidupannya berbasis teknologi nyatanya dapat membantu perbaikan dalam berbagai persoalan pemerintahan, khususnya birokrasi yang selama ini masih berbelit. Misalnya, dengan meningkatkan standar pelayanan publik yang lebih efisien dan serba *online*. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem *e-government* yang

lebih transparan dan terintegrasi. Pelayanan dapat diperoleh oleh masyarakat secara real time dan tidak membutuhkan biaya operasional yang tinggi.

Namun, pada umumnya generasi ini memiliki sifat ‘pemalas’. Keberadaan mereka harus selalu diarahkan untuk mengacu kepada nilai-nilai mental yang baik, sebagaimana yang diamanatkan pada area perubahan dalam peta jalan reformasi birokrasi jilid 2. Pada area perubahan tersebut, mental ASN harus mengacu pada upaya peningkatan profesionalisme, peningkatan citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat, dan peningkatan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Dalam kesempatannya sebagai pembicara pada kegiatan Pembinaan Mental Nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai baru-baru ini, sosiolog Dr. Imam B. Prasodjo menuturkan pendapatnya terkait generasi milenial dalam kedudukannya sebagai pelaku birokrasi.

“Generasi milenial adalah kelompok yang tidak pada tempatnya lagi jika diperlakukan sebagai junior. Mereka adalah penggerak utama perubahan. Bisa saja pangkatnya rendah dalam sudut kepegawaian, tetapi dari sudut perilaku digital, mereka adalah penduduk aslinya. Generasi sebelumnya yang notabene seniornya dapat dikatakan sebagai imigran.”

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa generasi milenial merupakan bibit penerus bangsa yang memiliki potensi sangat besar. Perilaku mereka yang serba digital, berbasis IT, serta kebiasaan *paperless* perlu diberikan tempat yang lebih luas. Oleh sebab itu, arahan dan pembinaan yang diberikan harus menyesuaikan dengan karakteristik mereka yang cenderung berbeda dengan generasi sebelumnya.



Ilustrasi
A. Wirananda

KPPBC Tipe Madya Cukai
Kediri, Jawa Timur

Menyambung Rasa Perkuat Kinerja

Industri rokok memiliki karakter khusus yang konsumsi dan distribusi hasil produksinya perlu pengawasan khusus. Di Kediri, tanggung jawab itu diemban oleh KPPBC TMC Kediri. Lalu apakah perannya hanya sebatas itu saja?



Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC-TMC) Kediri merupakan sebuah kantor perwakilan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang membawahi wilayah kerja meliputi Kediri, Nganjuk, dan Jombang. Kantor ini menjalankan tugas dan fungsi untuk memungut dan mengumpulkan penerimaan negara berupa bea masuk dan cukai. Pengawasan juga dilakukan terkait perdagangan barang impor lewat kantor pos, dan yang menjadi fokus utama adalah peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal.

Dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, maka dibentuk beberapa tipe kantor modern. KPPBC Kediri yang semula Tipe A3 telah ditetapkan menjadi Tipe Madya Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC Operasional mulai tanggal 1 September 2008 dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan

Cukai nomor KEP-50/BC/2008.

Pelayanan dan pengawasan cukai industri rokok yang telah ada sejak tahun 1950-an bisa dibilang adalah fokus utama pelaksanaan tugas dan fungsi kantor perwakilan bea dan cukai ini. Rokok memang produk andalan dari kota santri yang terletak di delta Sungai Brantas ini. Meski mendominasi persentase pengguna jasa di kantor ini, pengusaha hasil tembakau bukan satu-satunya produsen yang hasil produksinya masuk dalam pengawasan dan pelayanan cukai. Kantor ini juga melakukan pelayanan dan pengawasan cukai dari hasil produksi pabrik *ethyl alcohol* yang ada di wilayah kerjanya. Kesemua hal tersebut menjadi kekhasan tersendiri dibanding kantor perwakilan bea dan cukai yang terdapat di kota lain di Indonesia.

Bebas korupsi, bersih melayani

Prestasi membanggakan kerap diraih kantor yang berlokasi di Jalan Diponegoro Kediri ini. Mulai dari menjadi kantor percontohan di tahun 2009, hingga mendapat Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden di tahun 2010. Tak heran, saat Kementerian



Gedung
KPPBC TMC
Kediri

Suryana,
Kepala KPPBC
TMC Kediri

Joglo Sambung
Roso, tempat
santai bertukar
pikiran

Mitra usaha
mengakses
layanan mandiri
di KPPBC TMC
Kediri

Foto
Anas Nur Huda

Keuangan mengamankan seluruh kantor di lingkungannya menjadi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM), KPPBC TMC Kediri tak ketinggalan untuk ambil bagian.

Upaya menjadi kantor yang menerapkan WBK/WBBM dimulai di awal 2013 dengan dibentuknya tim kerja khusus. Setelah melalui serangkaian penilaian dari internal hingga sampai di tahap Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN dan RB, KPK, dan Ombudsman, pada 23 Oktober 2013 kantor ini resmi menyandang predikat WBK/WBBM. Atas prestasinya tersebut, KPPBC TMC Kediri juga berhak menyandang gelar sebagai kantor pertama di lingkungan Kementerian Keuangan yang berhasil mendapat dua gelar beriringan tersebut.

Usaha berikutnya yang menjadi tantangan adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai baik itu agar membudaya bagi para segenap lapisan pegawai di kantor ini. "Ini terkait dengan bagaimana menjaga marwah WBK dan WBBM. Karena pegawai dan pejabat kan terus menerus mengalami pergantian," tekan Suryana. Untuk itu kantor ini menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keterampilan pegawai (P2KP) setiap tiga bulan sekali. Sehingga WBK/WBBM tak hanya sebatas menjadi tujuan, tapi juga sudah menjadi budaya dan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari identitas kantor ini.

Sambung rasa tingkatkan kinerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari KPPBC TMC Kediri ini dilakukan oleh 94 orang dari hulu ke hilir. Untuk memimpin 93 orang jajarannya, Suryana menekankan pentingnya komitmen lebih dari dirinya sebagai pimpinan. "Yang paling utama itu komitmen pimpinan, bagaimana ia bisa menjadi teladan bagi para stafnya. Dan juga unsur keterbukaan sehingga hubungan diantaranya bisa menjadi cair," ucap pria asal Tulungagung ini.

Di salah satu sudut kantor dibangun

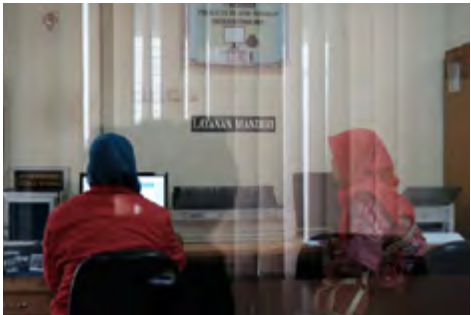
sebuah ruang bersantai sekaligus kantin kecil yang dinamai. "Joglo Sambung Roso". Di tempat ini, biasanya Suryana menghabiskan waktu luang sebelum atau sesudah jam kantor, serta waktu istirahat makan siang jika sedang tidak ada agenda di luar. Seperti halnya nama tempat ini yang berarti penyambung rasa, sang kepala kantor kerap terlibat perbincangan hangat dengan jajarannya.

"Obrolan ringan berlanjut ke topik serius. Dari situ kita sudah bisa melakukan mitigasi risiko, itu sudah dilakukan *day by day*," seru Suryana. Dengan suasana yang santai dan perbincangan cair, Suryana merasa lebih bisa banyak mendapatkan *insight* yang jujur dari para stafnya. Isu-isu yang didapat dari forum santai tersebut lalu dieskalasi dan dibahas lebih mendalam di forum yang lebih formal. Hasilnya adalah inovasi yang solutif dari masalah nyata yang ada di lapangan.

Mengoptimalkan peran

Selain upaya pengembangan dari sisi internal, pendekatan eksternal juga terus dilakukan oleh KPPBC TMC Kediri. Tantangan terbesar dari pihak luar memang masih minimnya pengetahuan masyarakat luas tentang peran Bea dan Cukai. Untuk itu, tim dari kantor ini kerap melakukan edukasi melalui beberapa kegiatan. Diantaranya yang sering dilakukan adalah aktif mengadakan acara saat *car free day*, menjadi narasumber di radio-radio lokal dan memberikan *coaching clinic* untuk para pemangku kepentingan.

Terhubungnya Pulau Jawa oleh Jalan Tol Trans Jawa, yang juga melewati wilayah kerja KPPBC TMC Kediri mendatangkan tantangan baru. Meski memiliki karakteristik khas terkait pengawasan cukai untuk industri rokok, sangat mungkin industri di daerah ini akan makin berkembang. Hal tersebut berdampak langsung terkait potensi yang sangat mungkin untuk terus digali sehingga peran bea dan cukai juga makin dapat teroptimisasi.



Pembangunan bandar udara bertaraf internasional di Kediri yang digadang-gadang akan mulai dikerjakan di tahun ini pun juga membuka wacana baru bagi masa depan kantor ini. Dengan adanya bandara, nantinya akan semakin memudahkan mobilisasi produk dari industri yang tersebar di wilayah kerja kantor ini. Potensi ekspor dan impor pastinya terbuka, peran kepabeanan pun akan dibutuhkan saat hal itu benar-benar terjadi di masa depan.

"Ke depan, rasanya tipe kantor ini harus dikembangkan. Tipe Madya Cukai rasanya sudah tidak akan memadai lagi dalam waktu dekat melihat dinamika perkembangan zaman," ungkap Suryana setengah berharap. Diakuinya bahwa wacana ini telah mulai diperbincangkan di forum informal. Namun, ia menambahkan bahwa memang perlu kajian yang lebih mendalam terkait rencana tersebut.

"Intinya kami yang di bawah ini harus bersiap melakukan perintah dari atas, apapun itu. Saat ini, yang terpenting adalah bagaimana kami mewujudkan nilai-nilai yang kami pegang, yaitu mewujudkan lingkungan kondusif melalui komunikasi efektif yang membuahkan budaya berpikir kreatif dan inovatif." tutupnya.

Teks Dimach Putra

Pejabat Lelang
periode 2010–2014

Riang Berang Pejabat Lelang

Usman Arif
Murtopo,
pejabat lelang
2010–2014

Foto
Ferdian Jati

Seorang pria membalas berangnya dengan segenap riang. Tiga tahun silam, senyumnya sempat lenyap berbulan-bulan. Remuk dikunyah kenyataan yang kelewat kejam. Suatu pagi menjelang liburan, ia diundang ke Denpasar. Tak ada rencana bermalam, tak ada pamitan yang diramaikan. Ia bahkan tak tahu bahwa malam-malam setelahnya adalah rangkaian perjuangan.

“Saya ditahan seminggu di sana. Setelahnya, saya dipindahkan,” katanya. Konon, situasi ini adalah buah dari tuntutan hukum seseorang kepadanya. Tuntutan yang bahkan ia sendiri tak pernah menyangka bakal mendapatinya. Bukan baru saja ia didaulat sebagai pejabat lelang. Tak sekali dua kali ia tersentil perkara hukum, meski kerap kali perdata. Lantas tiba-tiba sampailah ia pada perkara pidana yang memaksanya tak pulang selama beberapa waktu.

Sebelum itu, tentu ada proses panjang yang jua menguras isi kepala dan memenuhi rongga dadanya. Ia mesti menghadiri banyak panggilan dari lembaga berwenang. Tubuh lelah, pikiran payah. Berada jauh dari keluarga juga tentu perkara lain yang tak dapat dilepaskan begitu saja. Tentu perkara ini pelik bagi seorang kepala keluarga sepertinya. Tak ada ruang bertukar pikiran, tak ada kesempatan berbagi kasih bersama anak dan istri. Setiap malam adalah rapalan doa, setiap pagi adalah perjuangan memupuk harapan. Perlu kebesaran hati untuk tetap tangguh

dan memunguti syukur sebaik-baiknya. Perhatian orang-orang terdekat yang membuatnya tetap kuat menghadapi kerasnya kenyataan kala itu. “Ya, ini semua pelengkap episode kehidupan,” ujarnya mengenang. Pada akhirnya, ia diputus tak bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan.

Bertanggung jawab dari hulu ke hilir

Usman Arif Murtopo, pejabat lelang KPKNL Denpasar periode 2010 sampai dengan 2014. Sehari-hari tugasnya menggelar lelang. Membereskan segala tetek bengek sejak persiapan sampai dengan pasca lelang. Sebelum didaulat, ia dipersiapkan sebagaimana pejabat lelang pada umumnya. Ia mengikuti serangkaian proses pemenuhan kompetensi pejabat lelang, hingga akhirnya pada 2008 ia didaulat pertama kali sebagai pejabat lelang. Pejabat lelang wajib dibekali kompetensi lelang, pendalaman hukum, serta diwajibkan pula memenuhi

kompetensi sosial kultural terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk. Kompetensi ini penting dimiliki seorang pejabat lelang untuk mampu melaksanakan lelang dengan baik.

Banyak langkah yang perlu ketelitian dalam pelaksanaan lelang. Usai menerima permohonan lelang, pejabat lelang harus melakukan verifikasi dokumen permohonan. Kala dokumen dinyatakan lengkap dan dipastikan valid, ia akan menjadwalkan dan menggelar pelelangan.

Pada pelaksanaan lelang, ia akan berperan seperti konduktor dalam sebuah orkestra. Ia yang memimpin jalannya lelang. Melakukan verifikasi atas segala persyaratan, verifikasi atas peserta lelang, memeriksa jaminan yang disampaikan oleh peserta, serta pengecekan segala administrasi yang berkaitan. Nantinya, ia pula yang akan menetapkan pemenang dari pelelangan itu. Usai pelaksanaan lelang, ia masih perlu menyusun risalah dan minuta lelang. Setelahnya, ia juga yang akan bertanggung jawab memastikan pembayaran telah dilunasi oleh pemenang lelang kepada negara. Kendati proses yang perlu dilakukan begitu panjang, Usman tak keberatan dengan tugasnya.

“Ada kepuasan tersendiri kala barang yang kita lelang terjual dengan harga tinggi,” ujarnya sembari membubuhkan senyum di akhir kalimat. Ia lantas menceritakan sekelumit pengalaman yang tak melulu memicu berang sepanjang karirnya sebagai pejabat lelang. Ada kisah tentang barang yang sudah dilelang berulang kali tetap tak terjual. Ada pula barang yang hanya naik beberapa rupiah dari harga limit. Pun ada pula yang terjual berkali-kali lipat dari harga limitnya. “Saya (pernah) saksikan kedua pihak yang bersaing mengajukan penawaran sampai harga naik lebih dari

Suasana
pelaksanaan
lelang

Foto
dok. DJKN



satu miliar (rupiah) dari harga limit. Kemudian saat salah satu peserta telah ditunjuk sebagai pemenang, keduanya berpelukan dan meneteskan air mata,” katanya sambil mengenang kejadiannya.

Dari yang dikisahkan Usman, pelelangan seringkali tak semata-mata ihwal berpacu dalam penawaran. Tak jarang pelelangan melibatkan emosi yang dalam. Sebab, kita tak pernah tahu kisah di balik barang yang dilelang. Bagi sebagian orang, barang yang dilelang bisa jadi memiliki nilai sakral tertentu, atau bahkan nilai magis yang dikultuskan. Sebagian lagi, bisa jadi memiliki nilai-nilai tertentu yang memiliki ikatan emosional tertentu bagi calon pembelinya. Kita sama-sama tahu, pada beberapa situasi, segala yang tak hidup bisa jadi telah menghidupi yang hidup.

Solidaritas tanpa batas

Pria kelahiran Magelang ini lantas menceritakan perjuangannya sebagai pejabat lelang. Hadir sebagai petugas negara tak pernah sederhana. Menjaga ketelitian dan menjauhkan diri dari segala goda tak lantas menyelamatkan kita dari perkara. Menjelang pergantian tahun 2015, ia terpaksa tak pulang beberapa waktu karena menjalani perkara pidana. Seseorang menyatakan tuduhan pidana kepadanya dan ia mesti menjalani serangkaian konsekuensi.

“Namun dukungan dari teman-teman DJKN saat itu benar-benar luar biasa. Mereka begitu gigihnya membantu saya menghadapi kasus itu. Dan itu menguatkan saya. Saya benar-benar berterima kasih atas solidaritas teman-teman,” katanya dengan haru. Tiga bulan setelahnya, ia diputus tak bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan. Ia kembali menerima haknya dan menjalani kehidupan sebagaimana mulanya.

Kini ia didaulat sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal di KPKNL Yogyakarta. Ia menikmati tugas apapun yang mesti diemban. Ia pun bersyukur kini proses pelelangan sudah mengalami modernisasi. “Itu sangat memudahkan dan meringankan kerja pejabat lelang,” katanya kala diminta pendapat terkait portal lelang. “Selain lebih efisien, portal lelang ini juga lebih optimal membentuk harga lelang,” tukasnya. Ia mendukung penuh modernisasi yang ada di DJKN terkait pelaksanaan lelang. Pun, ia berharap kelak pejabat lelang lebih mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum yang lebih baik.

Teks A. Wirananda

Pajak *e-commerce* Lindungi Pengusaha

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*)

Perkembangan transaksi dagang melalui elektronik (*e-commerce*) semakin meningkat seiring meningkatnya penggunaan *gadget* oleh masyarakat dan tarif internet yang semakin terjangkau. Dalam risetnya, McKinsey memproyeksikan nilai pasar *e-commerce* Indonesia akan mencapai US\$65 miliar atau setara sekitar Rp910 triliun pada tahun 2022 mendatang. Angka itu naik delapan kali lipat dibanding tahun 2017 yang nilainya US\$8 miliar atau Rp 112 triliun. Peningkatan transaksi perdagangan daring tidak lepas dari perkembangan penyedia *platform marketplace*, antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan tersebut, pelaku *over-the-top* di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia *platform marketplace*. Beberapa perusahaan tersebut, empat diantaranya, telah menjadi perusahaan *unicorn*.

Semakin meningkatnya transaksi *e-commerce*, kondisi ini tentu memerlukan aturan yang tegas dari Pemerintah agar usaha berbasis konvensional dan usaha *e-commerce* bisa tumbuh bersama. Aturan perpajakan *e-commerce* diterbitkan untuk memberikan persamaan perlakuan perpajakan antara pelaku perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan konvensional. Selain itu, aturan juga

disusun untuk lebih memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan.

Secara garis besar, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang akan berlaku efektif mulai 1 April 2019 mengatur kebijakan transaksi *e-commerce* ini. Di dalamnya, PMK 210 mengatur perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas transaksi perdagangan dalam negeri melalui sistem elektronik (*e-commerce*), serta mengatur perlakuan Bea Masuk dan/atau PDRI atas impor barang yang transaksi perdagangannya dilakukan melalui sistem elektronik (*e-commerce*). Selain itu, PMK ini juga mengatur kewajiban penyedia *platform marketplace*, pedagang dan penyedia jasa yang berjualan di *platform marketplace*, serta penjual yang memasarkan barang atau jasanya melalui *e-commerce* di luar *platform marketplace*.

Bukan Pajak Baru

Untuk menghindari kesalahpahaman, perlu dipahami bersama bahwa aturan

ini bukan merupakan penetapan jenis pajak baru atau tarif pajak baru. Aturan ini menegaskan bahwa penyedia *platform marketplace* dan pedagang atau penyedia jasa *e-commerce* memiliki tanggung jawab yang sama dengan pengusaha konvensional, antara lain memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan pasal 3 ayat (3) PMK 210, penyedia *platform marketplace* wajib memiliki NPWP. Adapun untuk pedagang atau penyedia jasa, wajib memberitahukan NPWP kepada penyedia *platform marketplace*. Apabila belum memiliki NPWP, pedagang atau penyedia jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP atau memilih untuk memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia *platform marketplace*. Dalam aturan ini masyarakat perlu memahami bahwa pengusaha *e-commerce* diwajibkan untuk memiliki NPWP. Ada mekanisme pemberitahuan NIK apabila pengusaha tidak memiliki NPWP.

Prinsip keadilan lain yang ditegaskan dalam aturan ini adalah pedagang dan penyedia jasa melalui *e-commerce* juga harus melaksanakan kewajiban terkait Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pengusaha konvensional,

yaitu membayar pajak final dengan tarif 0,5 persen dari omzet apabila omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun atau pajak UMKM. Bagi yang memiliki usaha dengan omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melaksanakan kewajiban terkait pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal mempermudah proses pemenuhan kewajiban perpajakan, PMK ini juga memperkenalkan skema *Delivery Duty Paid* untuk impor barang kiriman dalam rangka mempercepat proses impor barang kiriman dengan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui fasilitas penyedia *platform marketplace* domestik.

Kewajiban Penyedia Platform

PMK Nomor 210/2018 menegaskan aturan untuk penyedia *marketplace*. Selain diwajibkan untuk memiliki NPWP, penyedia *platform* wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban lain yang diatur adalah penyedia *platform marketplace* memungut, menyetor, dan melaporkan PPN serta PPh terkait penyediaan layanan *platform marketplace* kepada pedagang dan penyedia jasa.

Selain itu *platform marketplace* juga wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN serta PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia *platform marketplace* sendiri. Hal lain yang wajib dilakukan adalah *platform marketplace* wajib melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna *platform* tersebut. Kendati demikian, *e-commerce* yang berada di luar *platform marketplace* memiliki kewajiban yang sama terkait pemenuhan aturan pajak. Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui ritel online, *classified ads*, *daily*

deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku

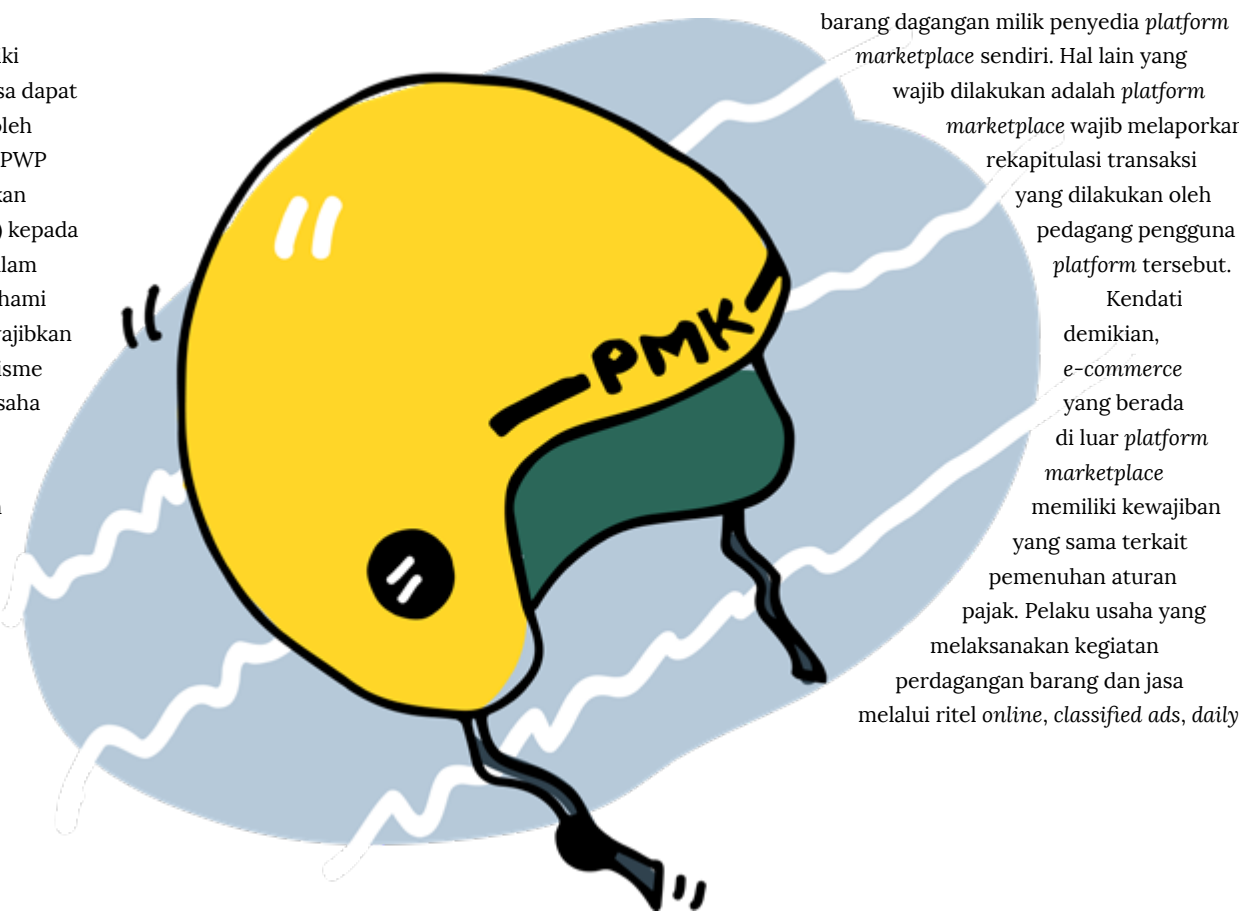
Penutup

Pemerintah membuat aturan pajak *e-commerce* bukan untuk mengejar target APBN 2019, tetapi lebih untuk membangun ekosistem dan *database* perpajakan yang komprehensif. Data akan dianalisis untuk melihat perkembangan *e-commerce* di Indonesia sebagai dasar penentuan kebijakan pengembangan bisnis *e-commerce* termasuk kebijakan perpajakannya. Pemerintah dapat mengetahui sektor yang berkembang, omzet, dan zonasi pedagang dan penyedia jasa. Informasi ini akan disinergikan dengan Kementerian/Lembaga terkait sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan misalkan OJK, BPS, dan Bappenas.

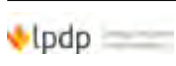
Masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan adanya aturan pajak *e-commerce* akan memengaruhi omzet penjualan karena aturan ini hanya penegasan jenis pajak yang menjadi kewajiban pengusaha *e-commerce*. Apabila pengusaha sudah melakukan kewajiban perpajakan dengan benar, tidak perlu mengkhawatirkan terbitnya PMK 210/2018. Dengan adanya aturan pajak *e-commerce*, ada persamaan perlakuan antara pengusaha konvensional dan pengusaha yang memasarkan barang ataupun jasanya melalui *e-commerce*. Ini akan memudahkan dan memberikan kepastian hukum bagi pedagang dan penyedia jasa apabila di kemudian hari ada permasalahan di mata hukum.

Teks Budi Sulistyono

Ilustrasi
A. Wirananda



Berkreasi Lewat Teknologi


Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Giri Kuncoro mensyukuri keputusannya melanjutkan pendidikan di Cornell University, Amerika Serikat (AS). Dia mengaku, hal ini menjadi salah satu keputusan terbaik dalam hidupnya. Berguru langsung dengan profesor mahsyur di bidang *information technology* (IT), beroleh relasi dan akses riset dari sejumlah perusahaan ternama dunia, hingga kesempatan belajar di pusat teknologi dunia, Silicon Valley, adalah beberapa kemewahan yang dia rasakan.

Melalui beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Giri berhasil menuntaskan pendidikan master di bidang *Information Science*. Baginya, Cornell University telah membuka matanya akan dunia teknologi sebenarnya. Sekaligus, menyadarkannya masalah utama yang membayangi perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Masa ekonomi digital

Giri menuturkan, Indonesia telah memasuki tahap transformasi ekonomi digital dan memulai era industri digital. “Ditandai meledaknya penetrasi *smartphone* dan internet, serta lahirnya para *unicorn*,” ungkapnya.

Unicorn adalah sebutan bagi perusahaan rintisan (*start-up*) yang bernilai di atas USD1 miliar. “Perusahaan tersebut diantaranya GOJEK, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. (Mereka) telah mentransformasi hidup puluhan, bahkan ratusan juta rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sayangnya, lanjut Giri, perkembangan

pesat ekonomi digital tidak dibarengi dengan jumlah *software engineer* yang dibutuhkan. Bahkan, sulit menemukan orang Indonesia yang memiliki keahlian spesifik dan pengalaman kerja *engineering* yang cukup lama.

Beruntung, dengan bekal yang diperoleh dari Cornell University dan pengalaman kerja di Silicon Valley sebelumnya, Giri mampu mengisi kekosongan ahli di Indonesia, terutama untuk bidang *cloud computing* dan infrastruktur.

Menaklukan tantangan

Pada bidang *information science* Giri belajar membangun infrastruktur IT yang kompleks dan bisa digunakan dalam skala besar, yaitu *Cloud Computing* dan *Machine Learning*. Dia juga belajar menyentuh teknologi dari kacamata manusia, atau *human-computer interaction*.

“Bagaimana membuat teknologi yang diperlukan oleh pengguna dan berdampak bagi masyarakat. Banyak *software engineer* yang telah membuat teknologi canggih, tapi gagal karena tidak diperlukan pengguna,”ungkapnya.

Saat ditanya tips lolos LPDP, Giri mengaku, sebelumnya telah diterima beberapa kampus di AS. Selanjutnya pada sesi wawancara, Giri mampu meyakinkan para penguji akan potensi dan mimpinya untuk membangun teknologi dan ekonomi digital di Indonesia.

Kesempatan langka kuliah di Cornell University perlu dibayar dengan tantangan yang tak ringan. Giri menuturkan, budaya kompetitif dirasakan begitu kuat. Beban

kuliah yang tinggi, tak jarang menyita waktu para mahasiswa hingga dini hari dan akhir pekan. Lebih lagi, kondisi iklim seringkali tidak bersahabat.

“Cornell terkenal dengan saljunya yang tak kenal ampun. Saat puncaknya, salju bisa setinggi lutut kaki dan sulit dilewati,” kenangnya. Sepanjang satu tahun, salju turun selama 8 bulan terus-menerus. Hebatnya, tidak sekalipun Giri datang terlambat.

Berlimpah penghargaan

Besarnya tantangan tidak menyurutkan langkah Giri menjalani kegiatan di luar kampus. Bersama teman mahasiswa, Giri menginisiasi proyek Communicate Indonesia dan membuat aplikasi berbasis *short message service* (sms) untuk memudahkan para petani di Sulawesi Selatan (Sulsel). Proyek ini memenangkan dana dari Clinton Foundation dan Cornell Engaged Learning senilai USD7.500 untuk Indonesia. Aplikasi garapannya masih digunakan hingga kini untuk program dan pelatihan desa-desa di Sulsel.

Melalui Program Sahabat Beasiswa dan Indonesia Mengglobal, Giri memberi bimbingan intensif bagi para mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah ke luar negeri. Sementara di lingkungan kampus, Giri dipercaya menjadi asisten dosen untuk 200 mahasiswa pada satu mata kuliah. Tak heran, keaktifannya berbuah penghargaan dari Duta Besar Indonesia di Washington DC.

Prestasi gemilang juga berhasil dia torehkan. Giri menjuarai 3 buah



Giri Kuncoro di kantor GOJEK

Foto
Dok. Pribadi

Hackathon di AS. “Yang paling berkesan saat *hackathon* untuk bencana sosial di Haiti dan diimplementasi oleh salah satu yayasan di sana,” tuturnya. Giri juga menjuarai Kontes Cornell di kelas *Operating System*, dengan membuat *file-system* paling efisien.

Ajaibnya, di tengah kesibukan tersebut, nilai akademik pria kelahiran Jakarta ini tetap memukau. Cornell University menetakannya sebagai lulusan terbaik di jurusan pada 2016. Giri menempati posisi 2 teratas dari 150 mahasiswa di jurusan *master of computer science*, maupun *information science*. Pulang ke tanah air, LPDP juga menobatkannya sebagai Alumni Berprestasi untuk kategori Sains/Seni/Olahraga.

Bersama GO-JEK, bangun Indonesia

Cita-cita GO-JEK untuk membangun Indonesia dengan teknologi dirasa sejalan dengan misinya. Giri pun memutuskan bergabung dengan GOJEK pada April 2018 dan menempati posisi *senior software engineer*.

“Melalui barisan *code* yang saya program, secara tidak langsung, saya ikut memberikan kehidupan yang lebih baik untuk jutaan *driver*, pemilik warung makan, dan pengguna GOJEK,” tuturnya.

Beruntung, GOJEK memberi kesempatan kepada Giri untuk mengisi seminar ke seluruh Indonesia. Dalam delapan bulan terakhir, sudah diselenggarakan seminar sebanyak 15 kali. Timnya juga rajin mengajar para mahasiswa Indonesia melalui Program *Go Academy*. Program ini diinisiasi GOJEK guna memenuhi kebutuhan talenta di Indonesia seiring pesatnya perkembangan industri teknologi.

Selanjutnya, atas jaringan yang dia miliki di Silicon Valley, Giri menjadi salah satu wakil Indonesia pertama, sepanjang sejarah, yang menjadi pembicara di Konferensi Kubernetes terbesar di Shanghai, Cina. Kubernetes merupakan proyek *open source* terbesar yang melibatkan ribuan *engineers* di seluruh dunia

Tetap bersinergi

Giri berharap, kolaborasi antarpara *awardee* LPDP bisa tetap terjalin. “Misalnya dengan membentuk *working group* dan

special interest group untuk memudahkan berkontribusi,”usulnya. Dia juga mengajak para praktisi *software engineer* lulusan LPDP agar aktif di berbagai komunitas teknologi.

Lebih jauh, Giri mencermati pentingnya jaringan yang dibawa para *awardee*. “Saya berharap *networking* bisa jadi tolok ukur dan mandat yang diberikan LPDP kepada para penerima beasiswa,” pesannya. Sebab, *network* dengan negara luar terbukti membawa perubahan signifikan.

Ke depan, Giri berharap pemerintah bisa memastikan bahwa kemajuan industri IT mampu mendongkrak kompetensi teknis dan manajerial para *engineer* lokal. “India punya Satya Nadella (CEO Microsoft) dan Sundar Pichai (CEO Google). Kita, maksimal sepuluh tahun lagi, harus sudah punya yang sekelas itu,” ujarnya.

Terakhir, Giri berharap ada lebih banyak pelajar Indonesia yang bisa ke luar negeri. “Supaya semakin banyak yang membawa pulang semangat, inspirasi, dan *network* untuk membangun Indonesia,”

Teks Farida Rosadi



Akses isu-isu ekonomi hanya dengan sekali tap.

Install aplikasi Majalah Media Keuangan pada perangkat Anda.



MAJALAH MEDIA KEUANGAN



Bugar

Musim Hujan Tiba, Waspada ISPA Melanda

Dr. Rizki Dinar E.
(Balai Kesehatan Kementerian Keuangan)

Memasuki musim hujan, banyak masalah kesehatan muncul, mulai dari penyakit yang disebabkan nyamuk, gangguan pencernaan, hingga saluran pernafasan. Dari masalah tersebut, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi momok, karena merupakan salah satu penyebab angka kesakitan tertinggi.

Kala musim hujan, suhu udara menurun drastis dan curah hujan meningkat. Hal ini membuat tubuh kita lelah, dan daya tahannya melemah. Akibatnya, serangan berbagai virus dan bakteri sangat mudah masuk. Selain itu, pada kondisi kelembapan udara yang tinggi, virus dan bakteri juga lebih mudah berkembang di lingkungan luar.

Penanganan pertama

Penanganan pertama bisa dilakukan sendiri sebelum pergi ke dokter. Penanganan ini dapat meringankan gejala atau bahkan menyembuhkan pada kasus ISPA ringan. Pertama, lembapkan udara. Kedua, kurangi penggunaan *air conditioner* saat tidur. Ketiga, perbanyak istirahat dan jaga pola makan sehat. Keempat, perbanyak minum air mineral. Kelima, jauhi asap rokok. Keenam, gunakan obat ringan sebagai pilihan terakhir, dengan catatan konsultasikan pada dokter terlebih

dulu jika memiliki riwayat penyakit serius.

Kapan periksa ke dokter?

Segera hubungi dokter jika serangkaian penanganan pertama tidak memberikan efek perbaikan setelah 5-7 hari. Namun, secepatnya temui dokter bila mengalami demam menggigil, sesak napas yang tidak biasa, mual muntah terus menerus, atau nyeri menelan hebat. Selain itu, bayi berusia di bawah 3 bulan yang demam dan tidak mau minum ASI, wanita hamil/menyusui, dan penderita asma harus segera berkonsultasi ke dokter jika terkena ISPA.

Pencegahan terbaik

Pencegahan agar tidak terkena ISPA adalah dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih bersih dan teratur. Pencegahan penularan ISPA dapat dilakukan melalui tiga tahapan.

Pertama, hindari paparan virus. Virus dapat dihindari dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menghindari penggunaan alat bersama seperti gelas/botol minum dan handuk, membatasi paparan dengan orang terinfeksi, membatasi waktu berada di

kerumunan orang banyak, berkumur air minimal tiga kali sehari, melakukan vaksinasi flu, memperhatikan cuaca, dan menggunakan masker saat terpapar bahan iritan (asap rokok, debu, asap kendaraan bermotor, dan polusi industri).

Kedua, tingkatkan daya tahan tubuh. Memperkuat daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan berolahraga teratur dan tidur cukup, mengonsumsi makanan sayuran hijau empat porsi sehari, meminum suplemen vitamin C atau mengonsumsi buah-buahan asam seperti jeruk, lemon, dan kiwi, serta berhenti merokok.

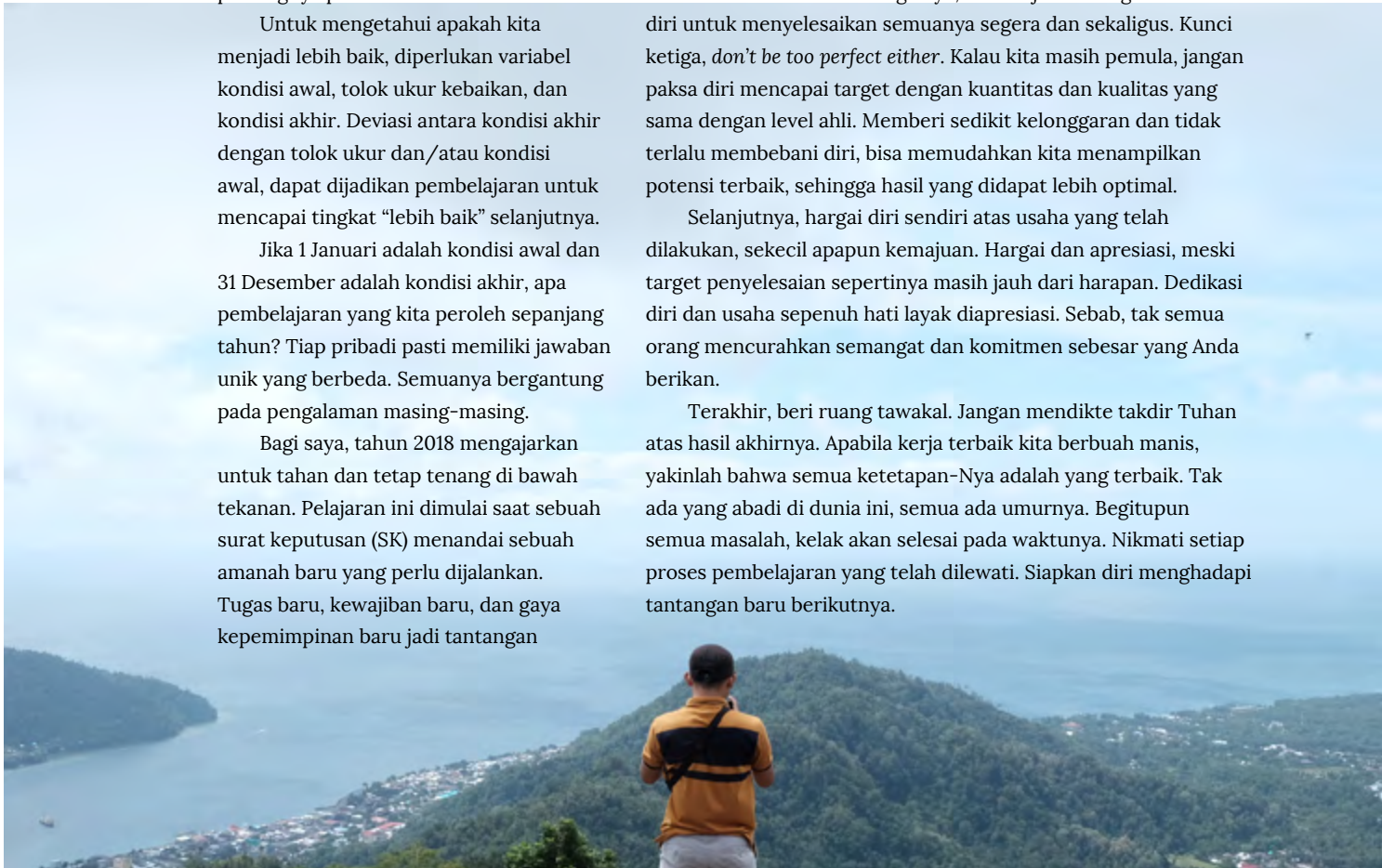
Ketiga, cegah penularan infeksi. Tutuplah hidung dan mulut saat batuk dan bersin. Namun, jangan menutup mulut dan hidung hanya dengan tangan. Gunakan tisu, lalu jangan lupa membuangnya di tempat sampah.

Foto
Anas Nur Huda



Bertahan di Bawah Tantangan

Foto
Resha Aditya



Bagi sebagian orang, tahun baru adalah momen tepat untuk mengevaluasi diri dan menetapkan target di tahun depan. Sementara bagi sebagian lain, tak perlu menunggu tahun baru untuk memperbaiki diri. Pendapat manapun yang kita pilih, setidaknya kita sepakat akan pentingnya perbaikan diri.

Untuk mengetahui apakah kita menjadi lebih baik, diperlukan variabel kondisi awal, tolok ukur kebaikan, dan kondisi akhir. Deviasi antara kondisi akhir dengan tolok ukur dan/atau kondisi awal, dapat dijadikan pembelajaran untuk mencapai tingkat “lebih baik” selanjutnya.

Jika 1 Januari adalah kondisi awal dan 31 Desember adalah kondisi akhir, apa pembelajaran yang kita peroleh sepanjang tahun? Tiap pribadi pasti memiliki jawaban unik yang berbeda. Semuanya bergantung pada pengalaman masing-masing.

Bagi saya, tahun 2018 mengajarkan untuk tahan dan tetap tenang di bawah tekanan. Pelajaran ini dimulai saat sebuah surat keputusan (SK) menandai sebuah amanah baru yang perlu dijalankan. Tugas baru, kewajiban baru, dan gaya kepemimpinan baru jadi tantangan

tersendiri bagi saya pribadi. Namun, hal ini ternyata bisa saya atasi dengan beberapa hal yang saya sebut sebagai kunci pertahanan.

Kunci pertama, kenali sebab terusnya ketenangan dan temukan akar permasalahan. Jangan habiskan waktu untuk khawatir dengan berbagai hal. Kekhawatiran pada kadar proporsional, bisa meningkatkan kewaspadaan. Namun dalam kadar berlebih, bisa memperlambat dan mematikan potensi.

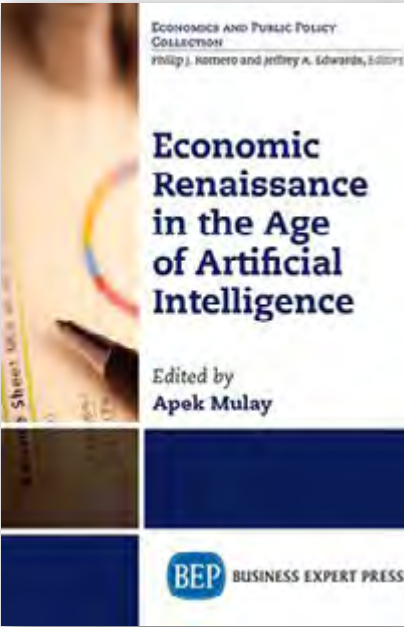
Kunci kedua, rencanakan langkah-langkah untuk mengatasi masalah beserta *timeline* logisnya, lalu kerjakan. Jangan memaksa diri untuk menyelesaikan semuanya segera dan sekaligus. Kunci ketiga, *don't be too perfect either*. Kalau kita masih pemula, jangan paksa diri mencapai target dengan kuantitas dan kualitas yang sama dengan level ahli. Memberi sedikit kelonggaran dan tidak terlalu membebani diri, bisa memudahkan kita menampilkan potensi terbaik, sehingga hasil yang didapat lebih optimal.

Selanjutnya, hargai diri sendiri atas usaha yang telah dilakukan, sekecil apapun kemajuan. Hargai dan apresiasi, meski target penyelesaian seperti ini masih jauh dari harapan. Dedikasi diri dan usaha sepenuh hati layak diapresiasi. Sebab, tak semua orang mencurahkan semangat dan komitmen sebesar yang Anda berikan.

Terakhir, beri ruang tawakal. Jangan mendikte takdir Tuhan atas hasil akhirnya. Apabila kerja terbaik kita berbuah manis, yakinlah bahwa semua ketetapan-Nya adalah yang terbaik. Tak ada yang abadi di dunia ini, semua ada umurnya. Begitupun semua masalah, kelak akan selesai pada waktunya. Nikmati setiap proses pembelajaran yang telah dilewati. Siapkan diri menghadapi tantangan baru berikutnya.

Economic Renaissance in the Age of Artificial Intelligence:

Martabat Manusia dan Ekonomi di Era Teknologi



Membaca kumpulan makalah bisa jadi sangat monoton, tapi berbeda dengan pengalaman membaca yang diberikan oleh buku ini. Makalah-makalah yang ada di dalam buku ini masih segar karena belum pernah diterbitkan di jurnal ilmiah sebelumnya. Mulay memang sengaja mengajak para pakar untuk bersama-sama menulis buku ini. Sebagai ahli ekonomi makro, Mulay tak hanya bertugas untuk menyunting buku ini, tapi juga menjelaskan ringkasan tiap bab, di samping menarik kesimpulan utama dari keseluruhan isi buku ini.

Buku yang terdiri dari 12 bab, ditambah satu bab terakhir berisi rangkuman dan kesimpulan dikemas dalam lima bagian. Di awal kita akan dijelaskan mengenai latar belakang teknologi dan berisi tiga bab masing-masing menjelaskan mengenai *internet of things* (IoT), *big data* dan kecerdasan artifisial serta *blockchain*. Memasuki bagian selanjutnya kita dibawa menyelami aspek sosial, lingkungan dan etika.

Pada bagian ketiga kita dihadapkan pada opsi-opsi kebijakan. Dua bab yang ada dalam bagian ini masing-masing adalah teknologi, penghasilan universal dan perlunya melakukan perubahan di planet bumi ini. Selain itu, munculnya praktik-praktik bisnis yang mendunia dengan peranan luar biasa dari teknologi dirasa perlu adanya aturan global yang dapat menyatukan dunia yang kian saling terhubung.

Dibagian penutup kita disajikan keterkaitan implikasi-implikasi spiritual

yang menghadirkan dua tulisan dalam dua bab yang berbeda. Bab pertama menjelaskan bahwa saat sekarang ini adalah era baru sains dan spiritualitas, sedangkan bab yang kedua meskipun masih berkaitan dengan ekonomi makro, tetapi melihatnya dari implikasinya pada meditasi dan kesadaran jiwa.

“Scientific change and intellectual transformation, unaccompanied by spiritual advancement, would lead not only to degradation in the physical arena such as our environment, but also to racism, bigotry, and social conflicts such as gun violence. Spirituality is the foundation of a sustainable human progress.”

Spiritualitas akan mencegah degradasi kemanusiaan kita, di samping kemajuan sains dan teknologi bukanlah ukuran kemajuan manusia jika martabat kemanusiaan kita tidak dibentengi oleh spiritualitas. Dan, spiritualitas dalam buku ini lebih didominasi oleh pemikiran dari India, tempat Mulay berasal, selain diuraikan oleh Shambhushivananda pada bab berjudul Meditasi dan Kesadaran).

Buku ini layak dibaca para pembuat kebijakan fiskal untuk menghadapi situasi ekonomi dewasa ini yang banyak terdisrupsi oleh intervensi teknologi IoT pada hampir semua lini kehidupan manusia. Jika masih menggunakan pola lama, buku ini menguraikan bahwa sudah saatnya berubah untuk memikirkan kesejahteraan yang ingin dicapai ilmu ekonomi dengan cara-cara yang berbeda.

Peresensi Annies Said Basalamah



Menikmati Harmoni Irama Gendang Beleq

Menjelajahi pesona alam dan kekayaan budaya Lombok seakan tiada habisnya. Tak hanya wisata pantai, gunung, biota laut, dan panorama alam lainnya yang indah, Lombok juga memiliki beragam seni budaya menawan. Salah satunya adalah gendang *beleq*.

Warisan budaya suku Sasak sebagai suku asli Lombok ini masih dilestarikan hingga sekarang.

Seperti halnya berbagai daerah lain di Indonesia yang memiliki alat musik tradisional, Lombok mempunyai perangkat musik tradisional yang disebut gendang *beleq*. Dalam bahasa Sasak, *beleq* berarti besar. Berbeda dari gendang lain yang umumnya ditepuk dengan telapak tangan, gendang *beleq* dibunyikan dengan cara ditabuh menggunakan sebilah kayu. Rangka gendang *beleq* biasanya terbuat dari batang pohon meranti



yang dilubangi. Kedua ujung rangka ditutup dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau sehingga menghasilkan suara yang besar dan bergema saat ditabuh.

Pada zaman dahulu, gendang *beleq* difungsikan sebagai alat musik yang mengiringi prajurit Sasak tatkala akan berangkat ke medan perang. Suara gendang *beleq* dipercaya mampu membuat para prajurit lebih berani dan percaya diri dalam bertempur. Demikian pula ketika para prajurit itu kembali dari medan perang, mereka disambut masyarakat dengan tetabuhan gendang *beleq*. Seiring

berjalannya waktu, fungsi gendang *beleq* bergeser tak lagi terkait dengan nuansa peperangan. Saat ini gendang *beleq* dipentaskan menjadi hiburan tradisional pada acara festival kebudayaan, penyambutan tamu, pentas seni, atau upacara adat pernikahan.

Gendang *beleq* dipentaskan secara berkelompok dan lazimnya terdiri atas lima belas hingga dua puluh pemain. Sebagian anggota kelompok bertugas untuk memainkan musik, sebagian lainnya berperan sebagai penari. *Sekaha* menjadi sebutan untuk para penabuh gendang.

Dalam suatu pertunjukan, biasanya terdapat dua orang pemain gendang utama. Walaupun gendang memiliki ukuran besar dengan lebar diameter lebih dari setengah meter dan panjang satu setengah meter, *sekaha* tak kesulitan memainkannya. Gendang digantungkan di leher atau bahu sehingga *sekaha* dapat menabuhnya sambil menarik gerakan-gerakan unik.

Terdapat beberapa jenis gendang dalam sebuah kelompok gendang *beleq*. Ada gendang *mama* yang menyimbolkan laki-laki, gendang *nine* yang menyimbolkan perempuan, serta gendang *kodeq* yang merupakan gendang berukuran kecil. Perbedaan gendang *mama* dan *nine* bukan pada rupa fisiknya, melainkan pada bebunyian yang dihasilkan. Gendang *mama* lebih nyaring dibanding *nine*. Saat keduanya dimainkan, ritme gendang yang dinamis terdengar. Fungsi gendang *mama* dan *nine* memang sebagai pembangun dinamika irama. Gendang *beleq* juga dimainkan bersama iringan alat musik lain seperti gong, *terumpang*, *pencek*, *oncer*, dan seruling sehingga menghasilkan irama rancak dan harmonis.

Untuk melestarikan seni gendang *beleq* dan menumbuhkan kecintaan generasi muda pada budaya asli suku Sasak ini, tak jarang pemerintah setempat menggelar perlombaan gendang *beleq* bagi pelajar, seperti yang saya tonton di kawasan Pantai Mandalika. Melihat para pelajar yang begitu antusias memainkan gendang *beleq* dan penonton yang memadati arena pentas tampak begitu menikmati pertunjukan, saya percaya gendang *beleq* akan sanggup bertahan di tengah gempuran musik modern.

Teks dan foto Adhi Kurniawan, Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



Pensiun Bukanlah Garis Finish

Andhika Diskartes,
Financial Planner

Ketika menghadiri seminar keuangan untuk mempersiapkan pensiun, Anda pasti sering mendengar petuah “Kalau mau dapat miliaran Rupiah di masa pensiun, tabung saja langsung ke reksadana atau saham. Dijamin pensiun kelak akan aman dan nyaman!”. Pada kenyataannya tidak ada orang yang bisa menjamin hal tersebut. Anda harus menghitung kebutuhan finansial terlebih dahulu untuk mencari alternatif instrumen yang paling tepat.

Untuk itu, ada beberapa poin yang perlu Anda persiapkan dalam rangka menghadapi Pensiun. Pertama, Anda perlu mengimajinasikan angka harapan hidup yang Anda harapkan. Bagi karyawan, menghitung kebutuhan pensiun harus dilakukan dengan memimpikan berapa lama ia ingin hidup pascapensiun. Misalnya saja, Ibu Keisha adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang memasuki masa pensiun di usia 60 tahun. Ia kemudian berharap untuk dapat hidup sampai dengan umur 70 tahun. Untuk merealisasikan harapannya tersebut, ia harus mengumpulkan dana yang cukup untuk biaya hidup selama sepuluh tahun sisa umurnya.

Yang kedua, setelah mengetahui harapan hidup yang ingin dipenuhi di masa pensiun, Anda perlu untuk menghitung biaya hidup per bulan. Caranya dengan menghitung kebutuhan Anda saat ini dan dua bulan sebelumnya lalu dibagi dengan tiga. Misalnya, Ibu Keisha mendapat gaji per bulan sebesar Rp20 juta. Secara historis, pengeluaran rutinnya selama bulan pertama sebesar Rp4 juta, bulan kedua sebesar Rp5 juta, dan bulan ketiga sebesar Rp6 juta. Dengan demikian, rata-rata pengeluaran bulanannya akan menjadi sebesar Rp5 juta.

Ketiga, setelah besaran pengeluaran per bulan saat ini

diketahui, selanjutnya Anda harus menghitung kebutuhan total selama sepuluh tahun atau 120 bulan sesuai dengan angka harapan hidup. Lebih lanjut, jumlah bulan tersebut Anda kalikan dengan angka rata-rata pengeluaran per bulan sebesar Rp5 juta, sehingga menghasilkan angka sebesar Rp600 juta. Belum selesai di sini. Untuk sentuhan akhir agar lebih presisi, dana tersebut harus dikonversikan dengan menggunakan nilai masa depan (future value). Nilai akhir itulah yang menjadi patokan besaran uang yang perlu Anda siapkan sebelum pensiun.

Yang terakhir, agar uang yang Anda simpan tidak tergerus inflasi, Anda sebaiknya menggunakan dua komponen investasi. Pertama, Anda dapat menggunakan emas yang dapat berfungsi sebagai pelindung nilai tabungan Anda setiap bulan. Alternatif kedua melalui instrumen investasi agresif seperti saham atau reksadana. Syarat utama yang perlu diperhatikan sebelum melakukan diversifikasi tersebut adalah hasil dari dana investasi tersebut harus memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan dana pengeluaran investasi yang telah dikonversikan ke dalam nilai masa depan.

Mas Praim

“MABUK GAWAI”

Cerita : Dimach Putra

Gambar : Bimo Adi





HARI PERS NASIONAL
9 FEBRUARI 2019



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA